

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, TENAGA KERJA,
DAN PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2017 – 2021 (TINJAUAN EKONOMI
ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh

NUR KHALIFATUL AFIDAH

NIM: G04219061



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya, Nur Kholifatul Afidah, G04219061, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 30 Juni 2023



Nur Kholifatul Afidah
NIM. G04219061

HALAMAN PERSETUJUAN

Surabaya, 30 Juni 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maziyah Mazza Basya', written in a cursive style.

Maziyah Mazza Basya, S.Hi., M.SEI

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, TENAGA KERJA, DAN PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2021 (TINJAUAN EKONOMI ISLAM)

Oleh

Nur Khalifatul Afidah

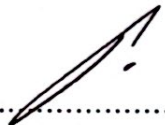
NIM: G04219061

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Tanggal 12 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Mazyah Mazza Basya, M.SEI.
NIP. 199001092019032014
(Penguji 1)
2. Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001
(Penguji 2)
3. Betty Silfia Ayu Utami, S.E., M.SE.
NIP. 198706102019032019
(Penguji 3)
4. Abdullah Kafabih, S.El., MSE.
NIP. 199108072019031006
(Penguji 4)

Tanda Tangan



Surabaya, 20 Juli 2023

Dekan



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Khalifatul Afidah
NIM : G04219061
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail address : nurkholifatulafidah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

yang berjudul :

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, TENAGA KERJA, DAN PENDIDIKAN

TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2021

(TINJAUAN EKONOMI ISLAM)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2023
Penulis



(Nur Kholifatul Afidah)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan pendidikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 dengan perspektif ekonomi Islam. Kemiskinan menjadi salah satu masalah besar yang harus dihadapi oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang tingkat kemiskinan paling tinggi diantara provinsi lain di Pulau Jawa. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi yang menggunakan indikator PDRB, Tenaga Kerja yang menggunakan indikator Jumlah Penduduk yang Bekerja, dan Pendidikan yang menggunakan indikator Rata-Rata Lama Sekolah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur secara parsial dan secara simultan yang ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian campuran yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode regresi data panel yang merupakan data *time series* dan *cross section*. Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi yang diambil dari website resmi Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Timur. Sedangkan penelitian kualitatif menggunakan metode statistik deskriptif dengan pendekatan studi pustaka.

Model analisis yang digunakan adalah panel data dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan menggunakan data *times series* selama lima tahun (2017-2021) dan data *cross section* sebanyak 39 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan hasil regresi data panel dan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa (Uji F) secara simultan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan hasil F hitung lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Serta (Uji T) secara parsial variabel independen dari Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan dengan hasil T-stat lebih kecil dari α ($0,024 < 0,05$), Tenaga Kerja berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan dengan hasil T-stat lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$) dan Pendidikan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan dengan hasil T-stat lebih kecil dari α ($0,003 > 0,05$).

Dalam perspektif Ekonomi Islam kemiskinan merupakan bentuk kesejahteraan perekonomian masyarakat dan agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan kesadaran masyarakat untuk membantu memulihkan perekonomian di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur agar terbebas dari jerat kemiskinan yang tidak disukai oleh Allah SWT, karena kemiskinan dapat membahayakan akidah, akhlak, moral, perilaku bahkan dapat memecahkan tali persaudaraan.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, Pendidikan, Kemiskinan

ABSTRACT

The study discusses the effect of economic growth, employment, and education on poverty in regencies/cities in East Java in 2017-2021 with an Islamic economic perspective. Poverty is one of the big problems that must be faced by many developing countries, including Indonesia. East Java is one of the provinces with the highest poverty rate among other provinces in Java Island. The aim of this study is to analyze the effect of economic growth using the GDRP indicator, the workforce using the Number of Working Population indicator, and Education using the Average Years of Schooling indicator on poverty in East Java partially and simultaneously from an economic perspective Islam.

This study uses a mixed method that combines qualitative research and quantitative research. This quantitative research uses panel data regression method which is a time series data and cross section. The data collection used the documentation method taken from the official website of the Central Statistics Agency of East Java. While qualitative research uses descriptive statistical methods with a literature study approach.

The analysis model used is panel data using the Fixed Effect Model (FEM) approach using time series data for five years (2017-2021) and cross section data from 39 district/cities in East Java. Overall the results of panel data regression and hypothesis testing can be concluded that (Test-F) simultaneously economic growth, labor, and education have a significant effect on poverty with the result that F count is smaller than α ($0,000 < 0,05$). And (T-test) partially the independent variable of Economic Growth has a significant negative effect on poverty with a T-stat result smaller than α ($0,024 < 0,05$), Labor has a significant negative effect on poverty with a T-stat result smaller than α ($0,000 < 0,05$) and Education has a significant negative effect on poverty with a T-stat result smaller than α ($0,003 < 0,05$).

In the perspective of Islamic Economics, poverty is a form of community economic well-being and in order to reduce the level of poverty which can improve people's welfare, public awareness is needed to help restore the economy in every district/city in East Java so that it is free from the poverty trap that Allah SWT does not like, because poverty can endanger faith, morals, behavior and can even break kinship ties.

Keywords: Economic Growth, Labor, Education, Poverty

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
DECLARATION.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.4.1. Bagi Penulis	16
1.4.2. Bagi Pihak Lain.....	16
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2.1.1.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi	18
2.1.1.3 Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan.....	22
2.1.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Tinjauan Ekonomi islam.....	23
2.1.2 Tenaga Kerja	28
2.1.2.1 Pengertian Tenaga Kerja.....	28

2.1.2.2	Klasifikasi Tenaga Kerja.....	30
2.1.2.3	Indikator Tenaga Kerja	32
2.1.2.4	Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan.....	38
2.1.2.5	Tenaga Kerja Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.....	39
2.1.3	Pendidikan.....	42
2.1.3.1	Pengertian Pendidikan.....	42
2.1.3.2	Indikator Pendidikan	44
2.1.3.3	Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan	46
2.1.3.4	Pendidikan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam	47
2.1.4	Kemiskinan	50
2.1.4.1	Pengertian Kemiskinan	50
2.1.4.2	Macam-Macam Kemiskinan	52
2.1.4.3	Penyebab Kemiskinan.....	54
2.1.4.4	Indikator Kemiskinan.....	58
2.1.5	Kemiskinan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam	59
2.1.5.1	Pengertian Kemiskinan	59
2.1.5.2	Ancaman kemiskinan	61
2.1.5.3	Faktor Kemiskinan.....	67
2.1.5.4	Cara Pengentasan Kemiskinan.....	69
2.1.6	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan	73
2.1.7	Kesejahteraan Sosial dalam Prespektif Ekonomi Islam.....	74
2.2	Kajian Literatur	78
2.3	Kerangka Konseptual	87
2.4	Pengembangan hipotesis	89
BAB III METODE PENELITIAN		91
3.1	Jenis Penelitian	91
3.2	Lokasi Penelitian	92
3.3	Data Model Empiris	93
3.4	Definisi Operasional Variabel	93
3.5	Jenis dan Sumber Data	95

3.6	Teknik Pengumpulan Data	95
3.7	Teknik Analisis Data	96
3.8	Pengujian Hipotesis	100
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		104
4.1	Gambaran Umum	104
4.1.1	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.....	104
4.1.2	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur	105
4.1.3	Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten/Kota di Jawa Timur	106
4.1.4	Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur	107
4.2	Deskripsi Statistik Variabel.....	109
4.3	Hasil Estimasi dan Pembuktian Hipotesis	110
4.3.2	Pemilihan Model Terbaik.....	111
4.3.3	Identifikasi Model Estimasi Terbaik Regresi Data Panel	114
4.3.4	Uji Asumsi Klasik.....	115
4.3.5	Perbaikan Model Estimasi.....	116
4.3.6	Uji t-Statistik (Parsial).....	118
4.3.7	Uji F-Statistik (Simultan).....	119
4.3.8	Koefisien Determinasi (R^2).....	120
4.3.9	Pembuktian Hipotesis.....	120
4.4	Pembahasan	122
4.4.1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.....	122
4.4.2	Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur	125
4.4.3	Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur	127
4.4.4	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Pendidikan secara simultan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur	130
4.4.5	Dampak Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur dalam Prespektif Ekonomi Islam	132
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		138

5.1 Kesimpulan	138
5.2 Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA.....	142
LAMPIRAN.....	147
BIODATA PENULIS.....	152



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	116
Gambar 4.2 Hasil Uji Autokorelasi.....	116
Gambar 4. 3 Hasil Uji F-Statistik (Simultan).....	119

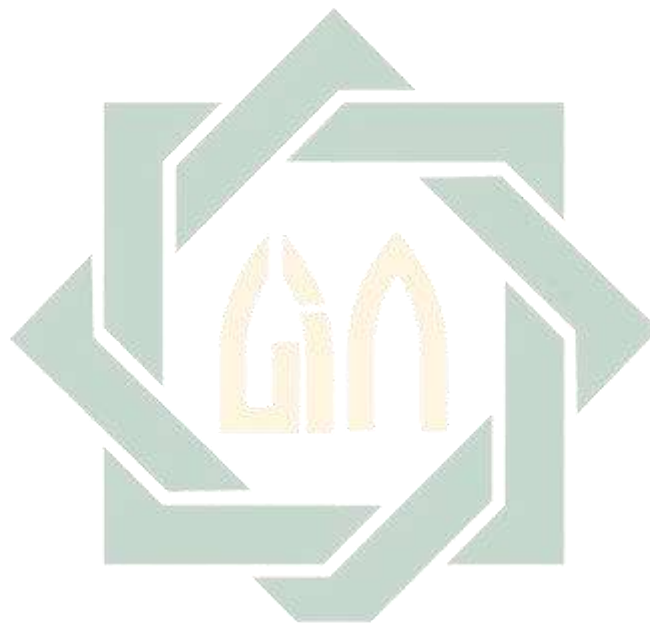


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Terhadap Indonesia	2
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Bekerja di Jawa Timur Terhadap Indonesia	4
Tabel 1.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Sedang Bekerja di Jawa Timur.....	5
Tabel 1.4 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Sedang Bekerja di Jawa Timur.....	6
Tabel 1.5 Rata-Rata Lama Sekolah Jawa Timur Terhadap Indonesia	8
Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Terhadap Indonesia	11
Tabel 4.1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2017-2021 (%).....	104
Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2017-2021 (%).....	106
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2017-2021 (%).....	107
Tabel 4.4 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2017-2021 (%).....	108
Tabel 4.5 Deskripsi Statistik Variabel	109
Tabel 4.6 Hasil Regresi Data Panel.....	110
Tabel 4.7 Hasil Uji LM	112
Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman	113
Tabel 4. 9 Model Terpilih FEM	114
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	115
Tabel 4.11 Hasil Regresi GLS	117
Tabel 4.12 Hasil Uji t-Statistik (Parsial).....	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Deskripsi Statistik Variabel	147
Lampiran 2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel	147
Lampiran 3 Pemilihan Model Estimasi.....	149
Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik	150
Lampiran 5 Hasil Genelarized Least Square (GLS)	151



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu indeks utama untuk membuktikan keberhasilan pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Mengoptimalkan angka kemiskinan merupakan pencapaian yang akan dilakukan oleh setiap negara, khususnya negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi adalah ketentuan fundamental bagi setiap negara di dunia untuk menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi, keadaan di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi yang diraih ternyata juga didominasi dengan adanya permasalahan jumlah penduduk yang meningkatkan dibawah garis kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang, sangat penting dalam pengentasan dan penurunan angka kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi lainnya. Secara garis besar, aspek tersebut dapat diasumsikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan peluang dan pemerataan ekonomi semakin berkembang (Naqvi, 2003). Pertumbuhan ekonomi adalah sistem kenaikan produksi suatu perekonomian yang diterapkan dalam struktur kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila Produk Domestik Bruto (PDB) riil negara tersebut terus meningkat dan hal ini akan menjadi salah satu indikator untuk menghitung pertumbuhan ekonomi (Huda, 2015).

Pertumbuhan ekonomi salah satu syarat wajib guna pengentasan kemiskinan. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi yang harus merata di setiap kategori pendapatan, termasuk di kategori masyarakat miskin. Perekonomian yang semakin berkembang dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menimbulkan transmisi pada sistem perekonomian di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indeks yang sangat relevan dalam mengukur kerja suatu perekonomian. Perekonomian dapat dikatakan mengalami kemajuan apabila produksi barang dan jasa bertambah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi membuktikan sejauh mana kegiatan perekonomian bisa mengakibatkan pendapatan bertambah atau kesejahteraan masyarakat pada jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang terus mengindikasikan adanya peningkatan menggambarkan bahwasanya perekonomian daerah tersebut meningkat dengan baik (Sukirno, 2008). Berikut tabel yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur:

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Terhadap Indonesia

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen)					
PROVINSI	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Timur	5.46	5.47	5.53	-2.33	3.56
Indonesia	5.07	5.17	5.02	-2.07	3.70

(Badan Pusat Statistik, 2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur menunjukkan pergerakan yang fluktuatif pada tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,46% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 5,47% hingga tahun 2019 sebesar 5,53%. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami

penurunan yang drastis sebesar -2,33% yang diakibatkan dari dampak pandemi Covid-19 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 3,56% yang membuat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur kembali stabil.

Dalam pandangan Islam, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu perkembangan yang terus menerus yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. (Naqvi, 2003) Islam membutuhkan dua aspek dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan itu sendiri (*growth*) maupun pemerataan (*equity*) yang dibutuhkan secara simultan. Islam tidak hanya memandang pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan itu sendiri (*growth*), akan tetapi juga dalam pemerataan, karena kesejahteraan manusia tidak digambarkan secara menyeluruh jikalau pendapatan dan produktivitas banyak terfokus pada kalangan kecil dimasyarakat.

Umumnya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat tujuan hidup yang akan dicapai merupakan sasaran yang dituju untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi agar tidak mengalami ketimpangan dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah adanya sumber daya manusia yang dilihat dari produktivitas penduduk disuatu wilayah. Jumlah penduduk yang tinggi atau mengalami kepadatan penduduk disuatu wilayah menjadi faktor dari terhambatnya pembângunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dicapai adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan serta pendidikan. Jumlah penduduk yang bekerja akan membantu untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Ketika taraf hidup suatu masyarakat baik akan

mengurangi jumlah penduduk miskin. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Bekerja di Jawa Timur Terhadap Indonesia

Jumlah Penduduk Bekerja di Jawa Timur Tahun 2017-2021 (ribu jiwa)					
PROVINSI	2017	2018	2019	2020	2021
Indonesia	124538	129479	131692	128454	131050
Jawa Timur	20034	20605	21032	20962	21037

(Badan Pusat Statistik, 2021)

Berdasarkan Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur relatif meningkat disetiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah penduduk yang sedang bekerja sebesar 20 juta jiwa, tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 20,6 juta jiwa, hingga tahun 2019 terus meningkat menjadi 21 juta jiwa. Namun pada 2020 mengalami penurunan menjadi 20,9 juta jiwa karena terjadinya pandemi covid-19. Kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 21 juta jiwa.

Dengan jumlah yang dijabarkan diatas, jumlah tenaga kerja dapat diklasifikasikan kembali sesuai usia. Berikut adalah data jumlah penduduk bekerja sesuai usia di Jawa Timur pada tahun 2017:

Tabel 1.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Sedang Bekerja di Jawa Timur

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Sedang Bekerja di Jawa Timur	
Kelompok Umur	2017
15-24	2.259.697
25-30	2.242.483
31-34	1.772.474
35-44	4.874.214
45-54	4.544.958
55-59	1.788.799
60-64	1.243.258
65+	1.373.337
JUMLAH	20.099.220

(Badan Pusat Statistik, 2021)

Pada tahun 2017, jumlah penduduk yang bekerja di dominasi oleh usia 25-44 tahun. Dimana penduduk di usia tersebut terdapat sebanyak 4,8 juta penduduk yang bekerja di Jawa Timur. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya produktivitas seseorang pada usia tersebut. Sedangkan yang paling sedikit ada pada usia 60-64 tahun sejumlah 1,2 juta.

Terdapat perbedaan klasifikasi umur pada tahun 2017 dan 2018 hingga 2020. Hal tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Sedang Bekerja di Jawa Timur

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Sedang Bekerja di Jawa Timur			
Kelompok Umur	TAHUN		
	2018	2019	2020
15-19	589.046	620.123	662.354
20-24	1.705.609	1.834.320	1.689.059
25-29	2.098.456	2.090.267	2.036.059
30-34	2.143.820	2.112.343	2.181.741
35-39	2.332.259	2.278.043	2.353.657
40-44	2.433.124	2.421.041	2.406.781
45-49	2.414.483	2.391.847	2.375.670
50-54	2.154.392	2.206.988	2.179.836
55-59	1.779.480	1.810.526	1.848.773
60+	2.799.280	2.890.134	3.229.067
JUMLAH	20.449.949	20.655.632	20.962.967

(Badan Pusat Statistik, 2021)

Jumlah penduduk bekerja pada tahun 2018 hampir seluruhnya merata, mulai dari 25-29 hingga 50-54 pada angka 2 juta hingga 2,4 juta. Pada 2019 dan 2020, jumlah penduduk bekerja terus meningkat. Namun, jumlah paling banyak tetap merata pada 25-29 hingga 50-54 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usia paling produktif dari seseorang untuk bekerja berada pada kisaran 25 tahun hingga 54 tahun.

Bahkan Islam telah memotivasi umatnya untuk bekerja keras dan selalu produktivitas yang menjadi kewajiban bagi kaum yang mampu dan kemudian Allah akan mengasihaninya dengan balasan yang setara sesuai dengan amal/kerja yang telah dilakukannya. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas pekerjaan yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menjadi stabil. Untuk memiliki kualitas pekerjaan yang baik, maka diperlukan produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu tinggi akan memberikan

kebahagiaan hakiki bagi masing-masing individu. Oleh karena itu, produktivitas sangat memperhatikan kemuliaan dan harkat manusia yaitu dengan memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik serta mengangkat derajat hidup manusia. Adapun dalam Islam indikasi hidup yang lebih baik salah satunya, yaitu produktif dan bermanfaat bagi banyak orang sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yakni:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya” (H.R ath-Thabrani, Al-Mu’jam al-Ausath dalam kitab: As-Silsilah Ash-Shahîhah).

Ada manusia yang masih dalam kategori usia produktif yang semestinya masih mampu untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan, tetapi malah tidak menghasilkan apa-apa atau menjadi pengangguran. Dengan demikian, Islam jelas melarang untuk menjeyrumuskan diri dalam kebinasaan. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

١٩٥

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Seperti halnya dalam lingkup pendidikan pun mampu mempengaruhi peningkatan dan penurunan angka kemiskinan. Pendidikan merupakan cara paling mudah untuk memajukan mutu sumber daya manusia. Mutu ekonomi, kesehatan,

tenaga kerja yang baik tidak akan mampu berjalan secara maksimal tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai dari segi pendidikan yang berkualitas baik. Di Indonesia pemerintah telah menjalankan program wajib belajar minimal 9 tahun untuk meningkatkan mutu pendidikan agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik. Selain untuk meningkatkan mutu pendidikan, juga dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia, serta dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik dengan mengenyam pendidikan yang benar dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tinggi rendahnya tingkat pendidikan dengan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Timur:

Tabel 1.5 Rata-Rata Lama Sekolah Jawa Timur Terhadap Indonesia

Provinsi	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Timur	7.87	7.95	8.11	8.31	8.37
Indonesia	8.5	8.58	8.75	8.9	8.97

(Badan Pusat Statistik, 2021)

Berdasarkan Tabel 1.5 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017 - 2018, rata-rata lama sekolah di Jawa Timur sebesar 7,87 - 7,93 atau setara dengan mengenyam pendidikan yang hanya sampai di kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2019-2021 sebesar 8,11-8,37 atau setara dengan mengenyam pendidikan yang hanya sampai di kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP). Angka rata-rata lama di Provinsi Jawa Timur tersebut menunjukkan bahwasanya indikasi kebijakan wajib belajar 9 tahun masih belum

berjalan dengan baik. Rendahnya pendidikan yang ditempuh akan membuat masyarakat menjadi bodoh. Oleh sebab itu, perlu dipahami bahwasanya kemiskinan bisa menjadikan kebodohan bagi kita dan kebodohan berkailan erat dengan kemiskinan (Wizard, 2010).

Semakin tinggi pendidikan yang dicapai, maka akan meningkatkan produktivitas. Jika seseorang memiliki produktivitas yang tinggi, maka pendapatan yang dihasilkan akan semakin tinggi. Pendapatan yang tinggi akan mempermudah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan bekal pendidikan yang telah dicapai oleh setiap individu akan mempermudah ia untuk menaikkan derajatnya dan membangun kehidupan yang lebih baik. Adapun dalam Islam indikasi hidup yang lebih baik salah satunya, yaitu berilmu. Semakin tinggi ilmu yang diraih akan semakin menunjukkan kualitas hidup seseorang yang lebih baik. Oleh sebab itu, Islam mendorong kita untuk berilmu dan banyak mengetahui akan sesuatu yang bermanfaat. Seseorang yang memiliki banyak ilmu seperti para ulama dan ahli Islam akan menuntut mereka untuk selalu bertaqwa atau takut kepada Allah, sebagaimana firman Allah Q.s Fathir:28:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَآبِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۚ ٢٨

Artinya: Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.

Ketiga faktor tersebut merupakan permasalahan yang harus dihadapi untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu problematika makroekonomi yang menjadi ancaman terbesar dalam skala global, tidak terkecuali

Indonesia. (Badan Pusat Statistik, 2021) mengatakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seorang individu atau dalam sebuah wilayah, keadaan tersebut disebut dengan kemiskinan. Dampak yang ditimbulkan dari peningkatan kemiskinan cukup bervariasi, selain dapat menimbulkan masalah sosial, kemiskinan juga dapat menimbulkan dampak pada pembangunan ekonomi pada suatu negara (Arunachalam & Shenoy, 2017). Kemiskinan yang tinggi dapat menimbulkan tanggungan bagi suatu negara untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, sehingga tercipta ancaman peningkatan kemiskinan secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi suatu negara. Maka dari itu ancaman kemiskinan harus segera diselesaikan melalui peraturan kebijakan yang sistematis pada seluruh elemen masyarakat yang ada (Cholili, 2014).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat pendapatan masyarakat yang rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya. Pada umumnya, permasalahannya yang dihadapi oleh negara berkembang salah satunya Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya menjadi satu permasalahan yang terjadi di negara berkembang, bahkan negara maju juga memiliki permasalahan tersebut walaupun tidak sebesar di negara berkembang. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek. Karena berkaitan dengan pendapatan rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (World Bank, 2004).

Pada negara berkembang, kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang cukup kompleks. Konteks kemiskinan dalam suatu negara atau daerah merupakan

gambaran dari kualitas kesejahteraan penduduk yang menempati negara atau daerah tersebut (Christianto, 2013). Kemiskinan di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi karena mayoritas masyarakatnya terjun dalam industri pertanian dan masih tercakup dalam kelompok masyarakat miskin. Hal tersebut dikarenakan produktivitas tenaga kerja dan penguasaan aset produktif yang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat dan tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan. (Mei Alfianto et al., 2019).

Menurut *World Bank*, salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan serta pendidikan yang diperoleh. Dalam sisi lain, kemiskinan juga bersangkutan dengan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran), serta kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang kurang layak. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur:

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Terhadap Indonesia

Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Timur Tahun 2017-2021 (Ribuan Jiwa)					
Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
Indonesia	26582,99	25674,58	24785,87	27549,69	26503,65
Jawa Timur	4405,27	4292,15	4056	4585,97	4259,6

(Badan Pusat Statistik, 2021)

Berdasarkan Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur relatif menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 4405.27 kemudian terjadi penurunan pada tahun 2018 sebesar 4292.15 dan pada tahun 2019 sebesar 4056.00. Namun di tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 4585.97, yang dimana faktor penyebabnya adalah menurunnya jumlah penduduk yang sedang bekerja di Provinsi Jawa Timur dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2021, jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 4259.60.

Ketika angka kemiskinan menurun akan terpenuhinya kesejahteraan sosial di masyarakat. Dengan kesejahteraan sosial yang terpenuhinya akan memniet masyarakat menjadi lebih Makmur. Maka dari itu, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah dengan menurunnya angka kemiskinan yang ada. Kemiskinan menjadi permasalahan yang kompleks jika dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka kemiskinan salah satunya tiga faktor yang menjadi variabel dari penelitian ini, yakni, PDRB, tenaga kerja, dan Pendidikan.

Persoalan mengenai kemiskinan tidak hanya dihadapi dalam tinjauan konvensional, namun juga dalam tinjauan Islam yang mengatakan bahwasanya kemiskinan merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap sepele dan akan menjadikan seseorang dekat dengan kekufuran. Dalam pandangan Islam, kemiskinan adalah persoalan atas kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi secara keseluruhan yang dimana dalam Syariat Islam telah ditentukan komponen yang

tergolong dalam kebutuhan pokok tersebut, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah (2:233):

﴿..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... ٢٣٣﴾

Artinya: Kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ..... ٦٠﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu. (Q.S. Ath-thalaaq (65:6))

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya tiga komponen tersebut termasuk dalam kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, karena berkaitan erat dengan kelangsungan hidup dan derajat manusia. Jika kebutuhan pokok tersebut tidak dapat terpenuhi secara layak, maka akan berdampak pada kehancuran atas kelangsungan hidup umat manusia. Kemiskinan telah menjadi ancaman bagi umat Islam, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah (2:268):

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ..... ٢٦٨﴾

Artinya: Setan menjanjiukan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir).

Jika penduduk yang sedang bekerja meliputi penduduk yang memiliki pekerjaan baik yang tetap maupun yang tidak tetap akan sama-sama menghasilkan pendapatan dan dengan pendapatan yang dihasilkan akan mampu meningkatkan taraf hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang terpenuhi dapat tergolong penduduk yang tidak miskin. Oleh karena itu, kesempatan kerja

yang tinggi akan menyebabkan kemiskinan mengalami penurunan. Untuk mendapatkan kesempatan kerja yang tinggi, maka diperlukan pendidikan yang cukup yaitu wajib belajar 9 tahun agar bisa menghasilkan pendapatan diatas garis kemiskinan. Dengan mengenyam pendidikan yang sesuai kebijakan pemerintah, maka kesempatan kerja yang diperoleh akan semakin tinggi. Jika suatu individu dapat menghasilkan pendapatan diatas garis kemiskinan dan mampu menaikkan taraf hidupnya, maka individu tersebut dikatakan bukan penduduk miskin.

Tetapi faktanya hingga tahun 2021 rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Timur masih berada pada angka 7,88 tahun, artinya masih penduduk yang belum mendapatkan pendidikan minimum sesuai kebijakan pemerintah wajib belajar 9 tahun. Hal tersebut menyebabkan upah yang diperoleh rendah atau berada dibawah garis kemiskinan. Bahkan banyak dijumpai penduduk dibawah usia 15 tahun yang putus sekolah akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan mereka memperoleh upah dibawah garis kemiskinan atau bahkan tidak bekerja (menganggur).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dengan judul penelitian sebagai berikut **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021 (Tinjauan Ekonomi Islam)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pendahuluan yang telah dijabarkan di latar belakang diketahui bahwa tingkat kemiskinan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan pendidikan. Kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai keberhasilan suatu sistem perekonomian di suatu negara atau daerah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka kemiskinan di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur. Oleh Karena itu, diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan seperti pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan pendidikan dapat terus meminimalisir kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.

Dari penjabaran diatas, dapat dirumuskan 3 rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan pendidikan secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan pendidikan secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021?
3. Bagaimana tinjauan dari sudut pandang ekonomi islam terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, pendidikan, dan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur secara parsial.

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur secara parsial.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur secara parsial.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Penulis

Menjadi suatu pembelajaran untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan pendidikan terhadap kemiskinan, sehingga teori yang diperoleh sewaktu masa perkuliahan dapat diaplikasikan dengan menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan.

1.4.2. Bagi Pihak Lain

Dengan adanya analisa yang telah dilakukan oleh penulis dapat memberikan suatu gambaran bagi penulis yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang. Dan juga dapat menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk menggunakan analisa yang telah dilakukan dalam mengambil keputusan kebijakan dalam mengentaskan masalah kemiskinan terutama di Provinsi Jawa Timur.

BAB II KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah aspek utama dalam sistem ekonomi di suatu negara maupun sistem ekonomi dimanapun. Secara luas dapat diprediksikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi mampu mendatangkan probabilitas dan keseimbangan perekonomian agar lebih berkembang (Naqvi, 2003). Pertumbuhan perekonomian dunia memicu dua pengaruh yang sangat krusial, yakni: *pertama*, taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat dunia semakin meningkat makmur dan *kedua*, semakin luasnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2021), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu negara yang mengalami proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju kondisi yang jauh lebih baik selama periode tertentu. Sedangkan menurut (Boediono, 1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan output dalam waktu yang sangat lama. Penggunaan aspek pertumbuhan ekonomi dapat diamati dalam jangka waktu yang sangat lama, misalnya sepuluh tahun, dua puluh tahun atau kian bisa lebih lama

dari waktu tersebut. Pertumbuhan mungkin timbul ketika terjadi kecondongan yang mungkin ada karena proses internal perekonomian itu, yang maknanya bahwa intensitas yang terjadi berasal dari perekonomian itu sendiri (Boediono, 1985).

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi maka harus diperhitungkan melalui PDRB rill tahun yang dihitung (PDRB_t) dengan PDRB tahun sebelumnya (PDRB_{t-1}). Perhitungan pertumbuhan ekonomi membutuhkan cara yang akurat, yakni dengan menggunakan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.1.1.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Ada dua indikator yang digunakan untuk menghitung taraf pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Barang dan jasa yang diproduksi tidak hanya diperoleh dari perusahaan dalam negara melainkan juga perusahaan luar negara juga memiliki faktor produksi tersebut. Dalam suatu perekonomian, poin yang cukup penting dalam suatu negara adalah output yang diperoleh.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Ada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi taraf perhitungan tambahan yang diperoleh dari semua komponen bisnis dalam suatu daerah atau merupakan taraf perhitungan dari semua kuantitas barang dan jasa konklusi yang diperoleh dari semua komponen ekonomi di suatu daerah (Badan Pusat Statistik, 2021).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku menerangkan taraf perhitungan barang dan jasa yang dihitung memakai harga pada setiap tahun dan dipakai untuk mengindikasikan besarnya taraf perekonomian dan kontribusi dibidang ekonomi. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan menerangkan taraf tambahan barang dan jasa yang dihitung memakai harga di tahun tertentu dan dipakai untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Susanti, 2003). Model perhitungan PDRB dapat menggunakan tiga pendekatan, yakni: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran, dibawah ini akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan taraf takaran atas barang dan jasa yang didapat dari semua komponen produksi di suatu daerah selama masa waktu tertentu (satu tahun). Komponen-komponen produksi tersebut yang dikategorikan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yakni: (1) Pertanian, (2) Pertambangan, (3) Penggalian, (4) Industri

Pengolahan, (5) Listrik, (6) Gas, (7) Air Bersih, (8) Bangunan, (9) Perdagangan, (10) Hotel dan Restoran, (11) Pengangkutan dan Komunikasi, (12) Jasa Keuangan, (13) Persewaan dan Jasa Perusahaan dan (14) Jasa-jasa.

b. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, taraf perhitungan dari setiap aktivitas ekonomi diperhitungkan dengan menjumlahkan seluruh balas jasa yang diperoleh dari aspek produksi, yakni pendapatan dan profit bisnis, penyusutan, pajak tidak langsung netto dalam bidang pemerintahan dan bisnis yang tujuannya tidak mencari profit. Profit bisnis mencakup *interest* yang dibayarkan netto, *ground rent*, dan profit. Teknik pendekatan ini serini digunakan dalam bidang jasa, akan tetapi harga yang dipungut tidak sebanding dengan harga pasar. Persoalan itu terjadi karena terbatasnya *evidensi* dan tidak adanya cara akurat yang bisa digunakan untuk menghitung taraf produksi dan biaya yang mencakup beragam aktivitas jasa, lebih-lebih aktivitas yang tidak mengeluarkan biaya (Tarigan, 2005).

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari prespektif pengeluaran merupakan perhitungan taraf dengan menjumlahkan nilai pemakaian akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh dalam negeri. Apabila ditinjau dari prespektif pemakaian maka jumlah pemasokan

produksi barang dan jasa tersebut akan dipakai untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi institusi non-pemerintahan yang tujuannya tidak mencari profit, konsumsi pemerintah (Wahyuningtyas et al., 2013).

Ada dua cara untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto yakni sebagai berikut:

a. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan merupakan perhitungan total nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan berdasarkan harga konstan. Harga yang digunakan adalah harga tetap dengan cara memperhitungkan ulang atau merumuskan berdasarkan harga pada taraf dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Hasil perhitungan yang diperoleh dapat menggambarkan taraf perekonomian yang riil (Badan Pusat Statistik, 2021).

b. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku merupakan total nilai tambah bruto yang muncul dari semua sektor perekonomian di suatu daerah. Yang dimana nilai tambah tersebut merupakan nilai yang ditambahkan dari gabungan faktor produksi dan Bahan baku dalam proses produksi. Perhitungan yang digunakan adalah nilai produksi sebagai input dikurangi biaya antara (Badan Pusat Statistik, 2021).

2.1.1.3 Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan

Produk Domestik Bruto merupakan suatu indeks keberhasilan suatu negara dalam penerimaan ekspansi yang lebih baik, apabila setiap tahunnya produk domestik bruto negara tersebut terjadi kenaikan yang signifikan, maka bisa diasumsikan bahwasanya sektor-sektor yang menggerakkan perekonomian negara mengalami ekspansi tersebut sangat baik sebab Produk Domestik Bruto tergambar dalam bentuk angka dapat menaikkan taraf hidup manusia keseluruhan dan juga dapat mengentaskan kemiskinan (Mustika, 2011).

Menurut Kuznet (Tambunan, 2003) bahwasanya pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat kuat sebab pada tingkat pertama proses prosedur pembangunan aspek kemiskinan cenderung meningkat dan pada waktu mencapai prosedur akhir pembangunan jumlah orang miskin perlahan-lahan semakin berkurang.

Kemudian dalam penelitian (Siregar, 2008) yang dihasilkan mengindikasikan hasil yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah penduduk miskin, artinya bahwa PDRB sebagai indeks pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian-penelitian terdahulu bahwasanya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan menurunkan angka kemiskinan. Penelitian

tersebut menjelaskan bahwa efektifnya pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai macam sektor, wilayah, dan waktu. Pertumbuhan ekonomi dalam sektor jasa dapat mampu menurunkan angka kemiskinan dibanding dengan sektor pertanian maupun industri. Dalam sektor industri, efektifitas pertumbuhan ekonomi dalam sektor industri guna menurunkan angka kemiskinan memiliki bermacam variasi menurut wilayah dan variasi ini memiliki hubungan dengan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) pada setiap wilayah.

2.1.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Dalam analisis menurut ekonomi Islam, bahwasanya dalam kajian pemikiran ekonomi Islam klasik, permasalahan pertumbuhan ekonomi telah menjadi minat pusat bagi para ilmuwan klasik. Pengkajian ini diambil dari firman Allah SWT dalam Q.S Hud: 61, yakni:

﴿... هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ...﴾ ٦١
 UIN SUNAN AMPEL
 SURABAYA

Artinya: *Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya*

Makna dari firman Allah SWT diatas bahwasanya Allah SWT menjadikan kita sebagai pengganti untuk menyejahterakan bumi. Istilah ‘kesejahteraan bumi” ini memuat penafsiran mengenai pertumbuhan ekonomi, seperti halnya yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada seorang pemerintahan di Mesir:

“Hendaklah kamu memperhatikan kesejahteraan bumi dengan perhatian yang lebih besar daripada kearah pengambilan pajak, karena pajak hanya bisa dimaksimalkan dengan kesejahteraan bumi. Barang siapa yang mengumpulkan pajak tanpa mengedepankan kesejahteraan bumi, negara akan mengalami kehancuran.” (At-Tariqi, 2004).

Pertumbuhan ekonomi dalam islam menekankan pada pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Indikator pertumbuhan ekonomi dalam Islam berupa pemerataan atau keadilan distribusi yang menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, apabila pendistribusian tersebut tertuju pada sekelompok kecil masyarakat (Muttaqin, 2018).

Islam menginterpretasikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi merupakan kelanjutan yang terus-menerus dari faktor produksi secara besar yang memiliki peran besar dalam kesejahteraan manusia (Sadeq, 2004). Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi berdasarkan dalam prespektif Islam sebagai salah satu taraf nilai. Barang dan jasa yang memberikan pengaruh negatif dan mampu mencelakakan manusia tidak akan bernilai sebagai kenaikan dari faktor produksi itu sendiri.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan semua kegiatan yang mencakup faktor produksi yang berhubungan erat

dengan keseimbangan distribusi. Pertumbuhan ekonomi meliputi segi yang lebih besar untuk kemajuan segi materiil dan spiritual manusia. Dalam makna lain, bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak hanya membahas mengenai permasalahan ekonomi kehidupan saja, tetapi juga membahas dari segi hukum, sosial, politik dan budaya. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam tinjauan Islam memiliki sifat multi dimness yang memuat faktor kuantitatif dan kualitatif. Sasaran yang ingin dicapai tidak hanya sebatas mencari kesejahteraan material di dunia, melainkan juga kesejahteraan akhirat. Dalam Islam, sasaran tersebut bersatu secara melekat.

Berdasarkan pandangan al-Tariqi, karakter yang harus dimiliki oleh Islam yang bertujuan agar tujuan pertumbuhan ekonomi dapat terlaksana, antara lain (At-Tariqi, 2004):

1. Komprehensif (*al-Syumul*); Untuk menciptakan keadilan sosial, islam memandang bahwasanya pertumbuhan lebih dari hanya permasalahan duniawi dan mempunyai tujuan umum daripada tujuan spesifik yang hendak dituju oleh sistem modern. Pertumbuhan ekonomi harus berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kemenangan yang dituju bukan hanya sekedar kemenangan dan

kemakmuran material duniawi saja, akan tetapi juga di akhirat.

2. Berimbang (*Tawazun*); Orientasi pada pertumbuhan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan kemajuan produksi, melainkan juga ditujukan berdasarkan prinsip keadilan distribusi yang telah dijelaskan dalam firman Allah: “Berbuat adilah kamu, sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketakwaan”. (Q.S Al-Maidah: 8). Pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan adanya keseimbangan antara upaya-upaya pertumbuhan. Oleh sebab itu, Islam tidak mengizinkan strategi kebijakan pertumbuhan di perkotaan dengan mengesampingkan pedesaan, pabrik yang melalaikan pertanian atau memfokuskan pada kecepatan rencana pembangunan tertentu dengan melalaikan fasilitas umum dan infrastruktur lainnya.
3. Realistis (*Waqi'iyah*); Realistis merupakan suatu pemikiran terhadap persoalan yang sesuai dengan kebenarannya. Pada konsep sosial secara universal, realistis menjadi salah satu syarat yang harus ada didalam pertumbuhan ekonomi, karena masyarakat akan sulit menerima keadaan nyata dengan menggunakan konsep idealis. Dalam Islam, Allah tidak akan memutuskan dan menerapkan peraturan idealis yang jauh

dari kehidupan manusia. Realistas Islam merupakan idealitas dan idealitas Islam merupakan realitas.

4. Keadilan (*'Adalah*); Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya pertumbuhan harus berdasarkan dengan keadilan distribusi. Sesuai dengan firman Allah: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan”. (Q.S Al-Nahl: 90). Dari firman Allah diatas dapat ditarik realitasnya bahwasanya kita dapat mengetahui tentang bagaimana besarnya negeri ini mengalami ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Realitas ketimpangan ekonomi ini tidak terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di negara berkembang dan negara maju. Oleh sebab itu, poin tersebut menjadikan pentingnya pertumbuhan yang dipadukan dengan pemerataan yang adil.

5. Bertanggung Jawab (*Mas'ulliyah*); Kebebasan yang diberikan secara mutlak tanpa batasan ketika Islam tidak memberikan celah kebebasan kepada setiap orang dalam aspek manapun dengan ungkapan yang merelfeksikan pengakuan pada setiap orang untuk merasakan kenikmatan material. Kebebasan yang diberikan harus ada batasan dari

berbagai peraturan yang menampakkan adanya jaminan kemakmuran seluruh masyarakat.

6. Mencukupi (*kifayah*); Dalam bidang pendistribusian kekayaan dengan takaran yang bisa memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan dalam batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh para ahli fiqih.
7. Berfokus Pada Manusia (*Ghayatuha al-insan*); Pada poin ini berbeda dengan teori pembangunan ekonomi kontemporer yang menerangkan bahwasanya daerah aktivitas pembangunan hanya di wilayah fisik saja. Oleh karena itu, Islam memperlebar daerah capaian objek pembangunan dari daerah aktivitas pada manusia. Permasalahan pembangunan ekonomi sangat diperhatikan Islam, akan tetapi yang utama tetap pada pembangunan umat Islam. Menuntut manusia pada jalan yang benar dan temak merupakan salah satu fungsi pokok Islam. Seluruh aspek yang bersangkutan dengan pembangunan ekonomi haruslah bersatu dengan pembangunan umat manusia seutuhnya.

2.1.2 Tenaga Kerja

2.1.2.1 Pengertian Tenaga Kerja

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 3 berbunyi bahwasanya tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Undang-Undang RI, 2003). Tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu daerah dalam memproduksi barang atau jasa, tenaga kerja dengan rentan usia kerja antara 15-64 tahun (Suparmoko, 2002). Sedangkan menurut BPS, tenaga kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dikategorikan bekerja (Badan Pusat Statistik, 2021).

Menurut teori Lewis terkait ketenagakerjaan yakni, pekerja yang mempunyai keunggulan dijadikan peluang yang besar terhadap kontribusi dalam pertumbuhan *output* dan tersediaan pekerja. Selain itu Lewis juga memberi pendapat bahwasanya ada dua aspek dalam perekonomian negara berkembang, yakni: aspek kontemporer dan aspek konvensional. Aspek konvensional tidak sekedar meliputi bidang pertanian di pedesaan tetapi juga di bidang informal perkotaan seperti penjual kaki lima, penjual angkringan. Dalam bidang informal, kelebihan dari tenaga kerja yang ada selama terlaksananya proses industrialisasi akan terserap dengan baik, maka taraf upah di suatu pedesaan akan meningkat.

Kenaikan upah yang terjadi akan meminimalisir adanya perbedaan taraf upah antara perkotaan dengan pedesaan, sehingga

tenaga kerja yang berlebihan tidak akan berdampak pada masalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, ketika tenaga kerja yang ada berlebihan akan menjadi modal untuk mengakumulasi upah dengan proposisi peralihan tenaga kerja dari aspek konvensional ke aspek kontemporer berjalan lancar dan peralihan tidak akan terjadi dalam tingkatan yang terlalu besar (Maryam et al., 2020).

2.1.2.2 Klasifikasi Tenaga Kerja

Penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang mencari pekerjaan, dan yang melakukan aktivitas lain seperti bersekolah dan menjalankan keperluan rumah tangga. Secara efisien definisi tenaga kerja hanya dibedakan menurut batasan usia (Manulang & Hamzah, 1995). Badan Pusat Statistika (BPS) sebagai penyedia data ketenagakerjaan memiliki beberapa konsep yang digunakan. Konsep tersebut memiliki kategorisasi antara lain:

a. Berdasarkan Penduduk

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk secara keseluruhan yang dinilai bisa bekerja dan mampu bekerja walaupun tidak adanya permintaan kerja. Dalam Undang-undang Tenaga Kerja, penduduk yang dikategorikan menjadi tenaga kerja yakni penduduk dengan usia antara 15 tahun sampai 64 tahun.

2. Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja merupakan penduduk yang dinilai tidak sanggup dan tidak ingin bekerja, walaupun ada permintaan untuk bekerja. Dalam Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, penduduk yang tidak masuk dalam usia kerja yakni penduduk dengan usia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun. Misalnya adalah lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

b. Berdasarkan Batas Usia Kerja

1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan masyarakat dengan usia produktif 15 tahun sampai dengan 64 tahun yang telah memiliki pekerjaan, akan tetapi beberapa waktu tidak bekerja ataupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

2. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja merupakan penduduk dengan usia 10 tahun keatas yang aktivitasnya sekedar sekolah, mengatur urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Misalnya (a) pelajar dan mahasiswa, (b) para ibu rumah tangga, (c) orang dengan kebutuhan khusus dan (d) pengangguran.

c. Berdasarkan Kualitasnya

1. Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang mempunyai suatu keahlian dan pengetahuan dalam bidang

tertentu yang didapat melalui pendidikan formal dan non-formal. Misalnya adalah pengacara, dokter, notaris dan lain sebagainya.

2. Tenaga Kerja Terlatih

Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang mempunyai kemahiran dalam bidang tertentu yang diperoleh lewat pengalaman kerja. Tenaga kerja ahli ini memerlukan training secara berulang kali agar bisa mengatasi pekerjaan yang dilakukan. Misalnya seperti apoteker, ahli bedah dan lain sebagainya.

3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih merupakan tenaga kerja keras yang sekedar mengandalkan tenaga saja. Misalnya seperti kuli, buruh angkut dan lain sebagainya.

2.1.2.3 Indikator Tenaga Kerja

Adapun indikator yang untuk mengetahui tingkat tenaga kerja di suatu daerah, yaitu:

1. Etos Kerja

a. Tinjauan Konvensional

(Chaplin, 2001) mendefinisikan bahwasanya etos kerja merupakan perilaku atau sikap dalam sebuah kelompok tertentu. Seluruh sumber daya manusia di suatu perusahaan tidak begitu saja memiliki etos kerja secara tiba-tiba, akan tetapi harus ada

dorongan dan juga diusahakan dengan niat yang sungguh-sungguh melalui proses yang terstruktur.

(Arep et al., 2003) menjelaskan bahwasanya etos kerja merupakan sikap dari seorang individu untuk melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, sehingga menimbulkan aura yang positif atau negatif untuk pihak yang berkepentingan.

Dalam sebuah perusahaan, ketika seseorang memiliki jiwa atau perilaku etos kerja yang baik akan membantu mereka dalam bekerja memahami bagaimana caranya mengerjakan pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu, Etos kerja dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku, gaya bicara serta aktivitas seseorang dalam bekerja di suatu perusahaan, yang dimana segala sesuatu yang terkait dengan pola pikir, bertingkah laku dan pembicaraan yang dilakukan adalah dampak dari etos kerja dalam sebuah perusahaan (Tasmara, 2002).

(Hansen et al., 1999) menyebutkan ada sepuluh nilai etos kerja, yaitu: (1) Kejujuran, (2) Integritas, (3) Tepat Janji, (4) Kesetiaan, (5) Keadilan, (6) Kepedulian, (7) Penghargaan terhadap orang lain, (8) Kependudukan yang bertanggung jawab, (9) Tercapainya kesempurnaan, (10) Akuntabilitas.

b. Tinjauan Islam

Etos kerja merupakan kepribadian, karakter dan mutu kehidupan manusia, kelakuan dan pola hidup serta perasaan hati

yang dimunculkan dari tingkah laku manusia ketika bekerja dengan niat yang sungguh-sungguh. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an yaitu:

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لِمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ١٣٥

Artinya: Katakanlah “Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Seseungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Islam tidak hanya mengisyaratkan untuk bekerja saja, akan tetapi dengan niat yang sungguh-sungguh dan usaha dengan semaksimal mungkin untuk dapat menikmati hasil kerja keras. Sebaliknya juga ketika orang yang tidak bekerja dengan niat dan usaha yang maksimal niscaya tidak akan mendapatkan kemakmuran.

(Triwuyono, 2000) menyatakan bahwasanya tujuan pokok etika Islam yaitu menaburkan rahmat pada semua makhluk yang tidak memiliki batas pada kehidupan duniawi dan juga kehidupan akhirat. Dalam sumber hukum dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, etika kerja Islam adalah untuk menyeleksi mana yang haq dan yang batil serta segala kehidupan manusia pada dasar keadilan dalam strata hukum dan integritas yang

menyeluruh. Dengan demikian, akan mendekatkan seseorang pada Tuhan dan menjadikan seseorang memiliki sifat adil yang dapat mewujudkan kemampuannya dan kemakmuran bagi semuanya.

2. Tingkat Upah

a. Tinjauan Konvensional

Menurut (*Undang-Undang NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, 2003) termuat dalam pasal 1 ayat 30 yang menyebutkan bahwasanya upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Terdapat tiga istilah yang berbeda dalam upah, yakni: gaji merupakan bayaran jasa yang diberikan untuk pegawai tetap, honor merupakan bayaran gaji yang diberikan untuk pegawai non tetap, dan insentif merupakan bonus gaji yang diberikan untuk pegawai biasanya dalam bentuk tunjangan (subsidi) guna memakmurkan pegawai (Halim & Gultom, 1987).

Upah yang diperoleh besar kecilnya ditetapkan oleh beberapa faktor antara lain (A. Karim & Adiwarman, 2007):

1. Mekanisme Pasar, Upah yang diperoleh oleh tenaga kerja yang tidak menentu dan fluktuatif biasanya terjadi di pasar yang tidak sempurna.
2. Jenis Kelamin, Seringkali penerimaan upah yang tinggi lebih dominan ke gender lelaki daripada ke perempuan.
3. Kualitas Kerja, Upah yang lebih besar akan diperoleh oleh seseorang yang memiliki keahlian dan berpendidikan yang tinggi dan sebaliknya ketika seseorang tidak memiliki kualitas kerja yang baik, maka upah yang diperoleh juga rendah.
4. Usia Kerja, Penentuan besar kecilnya upah biasanya terjadi di Pedesaan karena lebih sering menjadi penentu, karena dilihat juga dari UMR di Pedesaan.

Faktor produksi juga menjadi salah satu faktor penentu besar kecilnya upah yang diperoleh, karena berlaku hukum permintaan dan penawaran. Ketika penawaran tenaga kerja yang melimpah sedangkan permintaan akan tenaga kerja yang sedikit, maka tingkat upah yang diperoleh juga akan kecil. Begitu pun sebaliknya, jika penawaran akan tenaga kerja yang sedikit sedangkan permintaan tenaga kerja yang melimpah, maka tingkat upah yang diperoleh juga akan besar.

b. Tinjauan Islam

Upah didefinisikan sebagaimana yang maknanya tersirat di dalam firman Allah yakni:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
اِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya: Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah memberikan perintah untuk bekerja dengan baik dan berguna, karena sesungguhnya Allah akan melihat apa yang kita kerjakan lalu diberikan-Nya sesuatu kepada kita perihal apa yang kita kerjakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat diatas adalah Allah akan selalu memberi umat yang ada di bumi imbalan berdasarkan apa yang umat tersebut kerjakan. Imbalan yang diberikan bernilai sama dengan sistem upah di duniawi.

Penetapan upah dalam Islam berdasarkan prinsip keadilan, yang berarti bahwa upah yang diperoleh berasal dari kemufakatan antara pekerja, majikan, dan negara. Dengan hasil mufakat yang diperoleh akan diambil keputusan untuk kepentingan pekerja dan majikan secara adil. Keputusan yang adil dimana ketika tingkat upah yang diperoleh oleh pekerja tidak terlalu kecil untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya dan tingkat upah tidak terlalu tinggi untuk majikan, sehingga majikan tidak akan kehilangan porsi yang sesungguhnya. Maka diperlukan kebijakan pemerintah untuk menetapkan tingkat upah minimum di semua daerah dengan memperhitungkan transfigurasi kebutuhan pekerja golongan bawah dan di situasi bagaimanapun tingkat upah minimum ini tidak akan mengalami fluktuatif yang berkelanjutan (Yusuf, 2010).

2.1.2.4 Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan

Dalam penelitian ini penyerapan tenaga kerja berbanding lurus dengan angka kemiskinan. Semakin tinggi tenaga kerja yang diserap, semakin tinggi pula angka kemiskinan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tenaga kerja yang diserap, maka semakin rendah pula angka kemiskinan. Namun ada beberapa teori lainnya yang mengatakan bahwasanya melakukan investasi untuk tenaga kerja merupakan salah satu cara untuk menurunkan angka pengangguran. Ketika memiliki lapangan pekerjaan yang luas adalah proses keluar dari kemiskinan.

Ada dua penyebab yang dapat menerangkan mengapa tenaga kerja yang diserap justru meningkatkan angka kemiskinan. *Pertama*, adalah karena tenaga kerja yang diserap bukan dari golongan masyarakat miskin. Penyebab ketidakmungkinan ini didukung oleh teori bahwasanya jika lapangan kerja yang tersedia

membutuhkan kemampuan yang tinggi dalam bekerja yang tidak dimiliki oleh masyarakat miskin, maka mereka tidak akan bisa mencapai kesempatan untuk bekerja tersebut (Messkoub, 2008).

Kedua, karena jumlah tenaga kerja yang meningkat akan tetapi upah yang diperoleh oleh tenaga kerja tersebut tidak mencukupi untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka sampai diatas angka kemiskinan. Tenaga kerja yang terserap lebih besar terjadi dalam sektor pertanian sedangkan upah yang diperoleh oleh sektor pertanian paling kecil dibandingkan dengan sektor lainnya seperti sektor industri dan sektor perdagangan.

2.1.2.5 Tenaga Kerja Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Dalam pemikiran Hasan, tenaga kerja yang mempunyai mutu positif yakni bekerja keras dengan lapang dada dan menggemari pekerjaannya, hidup tentram dan taat akan peraturan, menjalin ukhuwah islamiyah dan gemar berjamaah, bersikap jujur, mampu berlega hati, menghargai kerabat, mengoptimalkan ikhtiar dan doa, menumbuhkan kemampuan diri, memenuhi janji, rajin beribadah, istiqomah untuk mencegah kemungkaran, bersikap amanah dan percara diri merupakan definisi tenaga kerja dalam Islam (Aedy, 2011).

Islam memotivasi umatnya untuk senantiasa bekerja terlebih lagi menjadikannya sebagai sebbah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia yang sanggup, dan ketika melebihi apa

yang diisyaratkan oleh Islam, Allah SWT akan menurunkan imbalan yang seimbang setara dengan kebajikan/kerja yang dilakukannya, tercerminkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: *“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*.

Menurut Islam, ada beberapa bentuk pekerjaan yang diperintahkan adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan keahliannya sendiri dan memiliki manfaat yang besar, misalnya :

(1) Menghidupkan tanah mati (tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun), (2) Menggali isi Rumi, (3) Berburu, (4) Makelar (samsarah), (5) Mudharabah, (6) Musaqat dan (7) Ijarah (Huda, 2008).

Adapun beberapa prinsip ketenagakerjaan menurut Islam antara lain (Huda, 2008):

a. Kemerdekaan manusia

Dalam Islam yang digambarkan dengan kegiatan yang taat sosial Rasulullah SWT dengan jelas pernyataan akan perbuatan

anti perbudakan guna menciptakan sistem kehidupan masyarakat yang lapang hati dan jujur. Metode perbudakan dalam Islam tidak dapat ditolerir dengan pertimbangan apapun. Adanya manifestasi jual-beli dan loyalitas atas hak-haknya yang amat tidak menghormati taraf kemanusiaan.

b. Prinsip kemuliaan

Apapun bentuk pekerjaannya, dalam Islam memberikan kedudukan setiap manusia dalam tempat yang bermartabat dan terhormat. Umat Muslim yang gigih dalam bekerja guna mencukupi kebutuhannya merupakan salah satu alasan Islam sangat begitu mencintai para umatnya. Seperti tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat 10 yakni:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”.

Ayat diatas ditegaskan kembali dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi: “tidaklah seorang diantara kamu makan suatu makanan lebih baik daripada memakan hasil dari keringatnya sendiri”.

c. Prinsip keadilan

Bagi kehidupan manusia, keadilan merupakan hal yang penting agar terciptanya pengakuan atas hak-hak yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

d. Prinsip kejelasan akad (perjanjian) dan transaksi upah

2.1.3 Pendidikan

2.1.3.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah sumber daya manusia yang menjadi salah satu bentuk investasi terhadap manusia. Melalui pengembangan kemampuan dan produktivitas kerja, pendidikan memberikan kontribusi langsung pada pertumbuhan pendapatan nasional. Untuk menangani keterbelakangan ekonomi, pendidikan diharapkan untuk mampu mengatasinya melalui peningkatan keterampilan manusia dan dorongan manusia untuk berprestasi (Mulyadi S, 2017). Pendidikan salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan melalui pendidikan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengelola keahliannya dan mengontrol hidupnya.

Setiap orang yang mempunyai persediaan wawasan dan kemampuan, memiliki opsi dalam memilih pekerjaan, dan menjadi lebih bermanfaat untuk menaikkan upah dengan pendidikan yang produktif. Tersedianya layanan pendidikan bagi setiap warganya minimal dalam jenjang pendidikan dasar merupakan kewajiban

dari setiap negara. Apagai dalam deklarasi HAM PBB disebutkan bahwasanya pendidikan adalah hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh setiap negara (Ustama, 2009). Melalui pendidikan yang baik, masyarakat dapat mampu berkomunikasi dengan lingkungannya secara baik. Selain itu, dengan pendidikan juga pola berpikir individu menjadi lebih baik dan pendidikan dapat membuat individu memiliki banyak wawasan, pengetahuan dan informasi yang terus meningkat.

Menurut teoritik dan empirik, pendidikan adalah sarana yang paling efisien dalam pembentukan karakter manusia yang baik, yang independent, memotivasi perkembangan seseorang dan memiliki pengaruh dalam kenaikan taraf hidup serta menjunjung nilai bangsa. Pendidikan juga mempunyai nilai kontribusi yang cukup tinggi untuk produktivitas nasional (Tholhah Hasan, 2004).

Di Indonesia, pendidikan tergolong dalam beberapa kategori yakni (Badan Pusat Statistik, 2021):

a. Pendidikan Formal

Pendidikan Formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.

b. Pendidikan Non-Formal

Pendidikan Non-Formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kursus, Pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

c. Pendidikan Informal

Pendidikan Informal merupakan aktivitas yang terstruktur diluar sistem sekolah yang dimana diterapkan secara independen yang memiliki jangkauan yang lebih luas. Pendidikan ini memang dilakukan secara terencana untuk menghadapi peserta didik dalam menghadapi target belajarnya.

2.1.3.2 Indikator Pendidikan

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan perhitungan dari rata-rata jumlah tahun yang dijalankan oleh masyarakat yang memiliki usia 15 tahun ke atas untuk menjalani semua tungkatan pendidikan formal. Untuk rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimum antara usia 15 tahun dan batas minimumnya diusia 0 tahun (standar UNDP). Usia 15 tahun yang merupakan batas maksimum menandakan bahwasanya jenjang pendidikan yang ditargetkan

adalah sejajar dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) (Atmanti, 2005).

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2021), rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk umur lebih di atas 15 tahun yang telah diselesaikan dalam Pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang Pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama atau tinggi jenjang Pendidikan yang ditamatkannya.

Rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwasanya semakin tinggi pendidikan yang diperoleh oleh setiap individu disuatu wilayah, maka semakin tinggi juga rata-rata lama sekolah yang dicapai. Dengan demikian, tingkatan pendidikan yang dijalani oleh setiap individu tersebut semakin tinggi. Dugaan yang biasanya terjadi dalam lingkup masyarakat yakni jika setiap individu menjalani tingkatan pendidikan yang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula derajat individu tersebut. Menurut asumsi Tobing bahwasanya setiap individu yang menjalani jenjang pendidikan yang semakin tinggi dapat diukur melalui waktu lamanya bersekolah dan hal tersebut mendukung setiap individu untuk dapat mempunyai pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik daripada individu yang memiliki pendidikan yang rendah.

2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf juga bisa menjadi salah satu indikator untuk mengetahui pertumbuhan tingkat pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat angka melek huruf atau kemampuan baca tulis, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia. Informasi lisan maupun tertulis yang terserap dengan baik oleh penduduk merupakan salah satu faktor keberhasilan seseorang dalam aspek baca tulis (Badan Pusat Statistik, 2021).

Angka melek huruf merupakan tolak ukur pertumbuhan pendidikan yang menjadi dasar untuk sebuah pendidikan dari implementasi membaca dan berhitung yang memiliki peran penting di kehidupan untuk menyampaikan sesuatu yang telah mereka pelajari. Dengan demikian, angka melek huruf adalah banyaknya penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan berhitung dalam pendidikan dasar. Dampak positif akan dirasakan oleh pendidikan di suatu daerah ketika angka melek huruf mengalami peningkatan terus menerus (Saputri et al., 2022).

2.1.3.3 Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Dalam menentukan pembangunan nasional, pendidikan memiliki kontribusi penting. Banyaknya ahli yang sependapat bahwasanya pendidikan menjadi sebuah proses kemanusiaan atau proses memanusiakan manusia. Pendidikan nasional menuai satu

kritikan deras yakni ketidakmampuan pendidikan untuk membuat seseorang keluar dari lingkaran kemiskinan. Antara kemiskinan dengan pendidikan menciptakan lingkaran setan karena masyarakat miskin yang tidak mampu untuk bersekolah tidak akan juga mampu untuk keluar dari pola kemiskinan.

Pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap kemiskinan, semakin pendidikan masyarakat mengalami peningkatan, akan semakin meningkat pula produktifitas masyarakat tersebut. Ketika produktifitas yang mengalami peningkatan akan meningkatnya juga pendapatan masyarakat. Sehingga masyarakat akan semakin sanggup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka kehidupan masyarakat yang terpenuhi akan membuat angka kemiskinan menurun (Ustama, 2009).

2.1.3.4 Pendidikan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Pendidikan merupakan komponen penting bagi setiap orang dalam meningkatkan kualitas diri sebagai manusia dan pendidikan sebagai penunjang peradaban bagi manusia. Dalam islam pemeliharaan akal disebut dengan istilah *hifdzul 'aql* yang dimana pendidikan menjadi instrumen untuk dapat mewujudkannya (Burhanuddin, 2014).

Menurut Islam, menimba ilmu adalah salah satu kewajiban bagi seluruh umat Islam, dikarenakan jika adanya ilmu maka seseorang dapat memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas

guna untuk memilah antara yang baik dengan yang buruk. Dengan seseorang memiliki ilmu yang luas akan membuat orang memiliki perilaku bijaksana dalam mencapai keputusan untuk setiap persoalan yang terjadi dan juga pendidikan membuat seseorang memiliki taraf kehidupan yang jauh lebih baik. Pemikiran Al-Ghazali mengenai pendidikan adalah salah satu alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perilaku negatif yang dimiliki oleh seseorang bukan merupakan cerminan dari pendidikan Islam.

Ketika manusia telah mampu menimba ilmu setinggi mungkin untuk memperbaiki kelangsungan hidup mereka dengan tekad, *ikhitar*, dan berdoa, niscaya Allah SWT akan meninggikan derajat para hamba-Nya yang tersebut, seperti yang tertera dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
 أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١

Artinya: “Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (Q.S Al-Mujadalah: 11)

Adapun tujuan pokok pendidikan menurut pemikiran Al-Ghazali yakni ber-*taqarrub* kepada Allah SWT dan manusia yang

selalu tawakal kepada Allah merupakan manusia yang sempurna dihadapannya. Kesempurnaan yang dapat dicapai oleh manusia ketika manusia tersebut mampu berusaha untuk mendapatkan ilmu dan menerapkan fadhilah dengan bekal ilmu yang telah dipelajarinya. Yang dimana, fadhilah inilah yang akan membuat manusia untuk tawakal kepada Allah SWT dan membawa manusia pada akhir kebahagiaan dunia dan akhirat (Agus, 2018).

Menurut pemikiran Al-Ghazali bahwasanya pendidikan memiliki tujuan yakni untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Ghazali mengatakan:

“Dan sungguh engkau mengetahui bahwa hasil ilmu pengetahuan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan pencipta alam, menghubungkan diri dan berhampiran dengan ketinggian malaikat, demikian itu di akhirat. Adapun di dunia adalah kemuliaan, kebesaran, pengaruh pemerintahan bagi pemimpin negara dan penghormatan menurut kebiasaannya”.

Sejalan dengan perilaku Al-Ghazali, beliau tidak hanya berfokuskan pada kehidupan duniawi saja atau kehidupan akhirat saja, akan tetapi menghimbau untuk berikhtiar dan bekerja secara bersamaan tanpa menyepelekan salah satunya. Berdasarkan pemikiran Al-Ghazali bahwasanya untuk mencapai kebahagiaan haruslah seimbang antara kehidupan duniawi dan kehidupan

akhirat serta dengan pendidikan derajat manusia ditinggikan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat.

Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan bisa terwujud apabila pendidikan tidak hanya diarahkan untuk kemampuan intelektual, tetapi juga kemampuan mental dan spiritual. Sehubungan dengan ini Al-Ghazali menganjurkan pendidikan anak melalui pembiasaan spiritual dan akhlak yang baik dalam kehidupan sosial.

Rasulullah menunjukkan pentingnya pendidikan dalam kehidupan sosial agar dapat mampu mengendalikan emosi dan amarah, memiliki etos dan kemandirian yang dapat membiasakan diri untuk hidup sederhana dan tidak larut dalam kenikmatan.

2.1.4 Kemiskinan

2.1.4.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu menjalankan hak-hak dasarnya untuk melindungi dan memajukan kehidupan yang bertaraf baik. Adapun hak-hak dasar tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan manusia yang bersifat universal (pangan), pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan, suasana tentram dari tindakan atau risiko aksi kekerasan, kebebasan untuk ikut serta dalam aktivitas sosial-politik (Bappenas, 2019).

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2021), kemiskinan dipandang sebagai suatu kondisi ketidak mampuan masyarakat dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari segi pengeluaran. Kemiskinan menggambarkan suatu keadaan kekurangan dalam segi ekonomi untuk mencukupi tolak ukur kehidupan rata-rata di suatu negara/daerah.

Permasalahan kemiskinan yang terjadi saat ini dikarenakan rendahnya penghasilan dalam mencukup kebutuhan pokok seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta mutu sumber daya manusia itu sendiri yang memprihatinkan. Dengan rendahnya penghasilan suatu masyarakat juga akan mempengaruhi kapabilitas tolak ukur rata-rata seperti dalam halnya kesehatan dan pendidikan. Permasalahan kemiskinan ini kebanyakan dialami oleh negara berkembang yang angka penduduknya tinggi sehingga timbul ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang bisa menimbulkan kesenjangan sosial.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan persoalan yang dihadapi oleh seluruh negara terutama di negara berkembang khususnya Indonesia. Kondisi ini disebabkan karena kemiskinan itu memiliki karakter multidimensional dimana kebutuhan manusia itu bermacam-macam, sehingga kemiskinan memiliki banyak

aspek utama yang tidak bisa ditiadakan seperti miskin akan kekayaan, organisasi sosial dan politik, pengetahuan dan keterampilan serta aspek pendukung yang bisa dipenuhi jika aspek utama sudah dipenuhi terlebih dahulu seperti miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Aspek-aspek tersebut diaktualisasikan dalam wujud kesulitan zat makanan, air, tempat tinggal yang kurang nyaman, kualitas kesehatan yang kurang baik, dan angka pendidikan yang rendah. Aspek kemiskinan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain baik secara kontan maupun tidak (Siamtupang & Dermoredjo, 2003).

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai persoalan yang dihadapi oleh perseorangan ataupun kelompok dimana mereka tidak mempunyai kelayakan sumber daya untuk mencukupi kebutuhan hidup yang efisien, baik dari segi ekonomi, kemasyarakatan, psikis maupun segi keagamaan. Makna ini memiliki inti dalam kemiskinan yaitu ketidakmampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (Arsyianti & Syauqi, 2016).

2.1.4.2 Macam-Macam Kemiskinan

Kemiskinan dapat dibagi berdasarkan sumber penyebab dan ukuran kemiskinan itu sendiri yang meliputi:

a. Sumber Penyebab (Soetomo, 1995) :

- Kemiskinan Kultural

Kemiskinan ini mengacu pada permasalahan perilaku seseorang atau masyarakat yang dipicu oleh aspek kebiasaan, seperti tidak bersedia membenahi taraf kehidupan, enggan bekerja, suka menghambur-hamburkan, tidak produktif walaupun ada dukungan dari pihak luar.

- Kemiskinan Struktural

Kemiskinan ini merupakan suatu kondisi miskin yang dipicu oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang berlangsung dalam suatu skema kebiasaan dalam kemasyarakatan dan skema kebijakan pemerintah yang tidak membantu pengentasan kemiskinan, namun seringkali menimbulkan berlimpahnya kemiskinan.

b. Ukuran Kemiskinan (Arsyad, 2016) :

- Kemiskinan Absolut

Kemiskinan ini bisa dapat diperhitungkan dengan membandingkan taraf penghasilan seseorang dengan taraf penghasilan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan pokoknya. Taraf penghasilan yang paling rendah merupakan penentu antara kondisi miskin dengan kondisi tidak miskin, atau kadang kala disebut

garis batas miskin. Presepsi ini sering disebut dengan kemiskinan absolut, yang dimana ditujukan untuk mematok taraf penghasilan minimum yang layak guna mencukupi kebutuhan materi seperti kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok untuk menjaga kesinambungan hidup.

- **Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan ini ketika seseorang telah memiliki taraf penghasilan untuk mencukupi kebutuhan pokok akan tetapi masih jauh lebih rendah dibanding dengan kondisi masyarakat sekitar, maka orang tersebut masih ditafsir dalam kondisi miskin. Contohnya, pola hidup yang mewah dan keinginan untuk hidup mewah.

2.1.4.3 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan bisa dipicu oleh karakter alamiah atau kultural, yaitu persoalan yang timbul di masyarakat berhubungan dengan penguasaan aspek produksi, kapasitas produksi dan taraf pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Selain itu, kemiskinan bisa dipicu oleh persoalan struktural, yaitu yang dipicu oleh miskinnya sistem dan strategi pembangunan domestik yang diterapkan (Subandi, 2011).

Penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor ekstern dan faktor intern, antara lain (Itang, 2015) :

a. Faktor Ekstern

- Kelompok referensi, yang dimana Kelompok yang memberikan dampak langsung atau tidak langsung terhadap tingkah laku dan kelakuan seseorang. Kelompok yang memberikan dampak langsung merupakan kelompok yang berisikan perseorangan dalam satu bagian yang saling berkomunikasi, sedangkan kelompok yang memberikan dampak tidak langsung merupakan kelompok yang dimana perseorangan tidak menjadi bagian dari kelompok tersebut. Dampak-dampak tersebut akan mengarahkan perseorangan tersebut pada tingkah laku dan kelakuan spesial.
- Keluarga. Keluarga memang memiliki kontribusi yang besar dan rentang waktu yang cukup lama dalam tingkah laku dan kelakuan seseorang. Keadaan ini karena paradigma didikan orang tua yang akan mendoktrin kemampuan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi paradigmanya.
- Posisi sosial, dimana sebuah komunitas yang relatif sejenis dan menetap sangat lama dalam sebuah populasi, yang tersistematis dalam sebuah rangkaian hierarki, dan para partisan dalam hierarki itu mempunyai taraf, keinginan, dan perilaku yang sama. Pola sosial klasifikasi

status dalam masyarakat terbagi menjadi dua elemen dasar, yaitu kedudukan (status) dan peranan. Taraf kemasyarakatan memiliki arti bahwa seseorang mempunyai tempat dalam zona pergaulan, otoritas hak-haknya serta kewajibannya. Taraf kemasyarakatan ini bisa diperoleh bagi perseorangan dengan menggunakan upaya yang berencana maupun dicapai atas kelahiran. Unsur yang bergerak dari posisi tersebut merupakan arti dari kontribusi. Perseorangan bisa dikatakan telah melakukan kontribusinya ketika ia telah mengimplementasikan hak dan kewajibannya sesuai dengan tarafnya.

- Kebudayaan. Ada beberapa aspek yang merupakan bagian dari kebudayaan, antara lain: wawasan, religi, kesenian, akhlak, norma, hukum adat dan kompetensi yang diperoleh perseorangan menjadi komponen dari masyarakat. Adapun bentuk-bentuk tingkah laku yang sesuai dengan norma mempelajari tentang seluruh objek dari kebudayaan yang mencakup karakter pola pikir, mencoba, dan berperan.

b. Faktor Intern

- Perilaku. Perilaku merupakan menyampaikan persepsi terhadap sasaran yang dikomposisikan dengan pengetahuan dan berdampak langsung pada perilaku guna

mempersiapkan suatu kondisi jiwa dan kondisi pikir. Kultur, adat istiadat, peradaban dan kondisi kemasyarakatan sangat mempengaruhi kondisi jiwa tersebut.

- Professionalisme dan observasi. Professionalisme bisa berdampak langsung terhadap observasi sosial dalam perilaku, Professionalisme bisa didapatkan dari seluruh perilaku dimasa lampau dan bisa dipelajari, dengan mempelajari perilaku orang lain juga akan mendapatkan professionalisme dengan mudah. Pengetahuan pada suatu fenomena dapat terbentuk dari hasil professionalisme sosial yang didapat.
- Personalitas. Perbedaan sikap dari setiap personel menentukan bentuk karakter seseorang dan pola perilaku merupakan makna dari personalitas.
- Persepsi individu. Aspek lain yang mempengaruhi karakteristik setiap orang adalah persepsi individu. Persepsi individu telah memerankan ancangan yang diketahui banyak orang untuk menjelaskan ikatan antara persepsi individu pelanggan dengan citra merek. Yang dimana minat terhadap suatu objek dipengaruhi oleh bagaimana setiap orang tersebut menilai dirinya sendiri. Setiap tingkah laku akan menentukan sikap perseorangan dalam menampung

persoalan hidupnya merupakan hakikat persepsi individu, karena awal kepribadian yang dijadikan frame of reference menjadi bagian dari aspek persepsi individu.

- Motif. Salah satu contohnya yaitu pola perilaku timbul karena adanya motif keinginan untuk merasa aman dan keinginan terhadap status yang ingin dipandang baik. Pola hidup yang condong berorientasi kepada pola hidup yang mewah terbentuk dari motif individu terhadap keinginan akan status yang ingin dipandang itu sangat besar.
- Persepsi merupakan cara individu menyeleksi, mengelola dan menafsirkan fakta untuk menciptakan suatu refleksi tentang dunia.

2.1.4.4 Indikator Kemiskinan

Ada beberapa indikator untuk mengukur kemiskinan, yaitu (Nugroho et al., 2020) :

1. Presentase Penduduk Miskin yakni dihitung dari presentase penduduk dengan pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan.
2. Jumlah Penduduk Miskin yaitu jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dalam suatu periode tertentu. Pemerintah melakukan perhitungan jumlah miskin setiap 6 bulan sekali pada bulan Maret dan September.

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Proverty Gap index) yakni ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai rata-rata kedalaman kemiskinan, maka semakin tinggi kemampuan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan. Angka indeks kedalaman kemiskinan yang menurun menunjukkan bahwasanya rata-rata pengeluaran penduduk miskin akan mendekati garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index) yakni untuk menghitung kesenjangan atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Dari ketiga indikator tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa alat yang paling sederhana untuk mengukur kemiskinan adalah dengan ukuran Persentase Penduduk Miskin (*Head Count Index*) (Kuncoro, 2006).

2.1.5 Kemiskinan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

2.1.5.1 Pengertian Kemiskinan

Al-Qur'an menafsirkan bahwa orang miskin merupakan orang yang memiliki hak untuk memperoleh zakat. Didalam Al-Qur'an kata "fakir" banyak ditemukan sebanyak 12 kali dan kata "miskin" sering diucapkan sebanyak 25 kali, yang setiap kata digunakan dalam definisi yang bervariasi (Huda, 2012).

Menurut Al Ghazali kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan secara pokok. Ketidakmampuan

selain kebutuhan pokok tidak termasuk dalam kategori kemiskinan (Huda, 2015).

Kemiskinan dalam perspektif islam dikategorikan dalam dua golongan yaitu fakir dan miskin. Fakir merupakan kondisi individu yang dimana orang tersebut tidak mempunyai keahlian untuk mencukupi kebutuhannya. Individu tersebut tidak mampu menjalankan usaha dikarenakan cacat dan sudah melampaui usia kerja yang seharusnya. Sedangkan miskin merupakan suatu keadaan yang dimana seseorang masih mempunyai keahlian untuk mendapatkan penghasilan akan tetapi penghasilan yang diperoleh tidak akan cukup untuk mencukupi kebutuhan pokoknya (Humanira & Annisa, 2013).

Al Ghazali mengkategorikan kemiskinan menjadi dua aspek meliputi kemiskinan yang berhubungan dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang berhubungan dengan kebutuhan spiritual. Aspek tersebut juga dikuatkan dengan pemikiran yang menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya termasuk dalam penyitaan barang dan jasa, melainkan juga minimnya ketentraman dalam jiwa. Pemikiran Rehman menjelaskan bahwa umat Islam bisa menaikkan taraf kehidupan rohani mereka dengan menaikkan taraf kehidupan material mereka terlebih dahulu. Selain itu, ada pemikiran lain dari Chapra menjelaskan bahwa Islam menjadi penengah dengan menitikberatkan yang

sama pada keduanya antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan duniawi (Huda, 2015).

Suatu yang aspek yang mampu menjadi ancaman bagi akhlak, keluarga dan juga masyarakat begitulah Islam memandang aspek kemiskinan. Kurangnya ketentraman antar masyarakat kaya dengan masyarakat miskin disebabkan oleh kemiskinan. Permasalahan ini akan menyebabkan adanya kesenjangan antar masyarakat. Apalagi kemiskinan ini juga menyebabkan seseorang terjun kedalam kekufuran.

Menurut Manawy, ada dua aspek yang memiliki implikasi yang sangat besar yaitu kekafiran dengan kekufuran. Karena dua aspek tersebut membentuk satu jalan menuju kekafiran. Iri dengki orang miskin dengan orang kaya ditimbulkan oleh adanya faktor kemiskinan, sedangkan iri dengki tersebut bisa menghilangkan perilaku kebajikan.

2.1.5.2 Ancaman kemiskinan

Dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada satupun yang membahas mengenai kemiskinan karena konsep *machiesme* dari persia, India atau paham *Rahbaniyah* dari kaum Mahesi dan Islam tidak membenarkan kaum sufi yang menerima konsep tersebut. Hadist-hadist yang menganut *zuhud* tidak berarti sepakat terhadap kemiskinan. Menurut Islam, kekayaan merupakan suatu nikmat sekaligus pemberian dari Allah SWT yang wajib disyukuri oleh

setiap umat manusia. Meskipun demikian, kemiskinan salah satu permasalahan yang perlu dihempaskan.

Dalam Al-Qur'an yang terdapat pada Surah Ad-Dhuha dijelaskan bahwasanya Allah SWT menakzamkan Rasul-Nya dengan kecukupan rezeki yang diberikan, yaitu sebagai berikut:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝۸

Artinya: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan (Qs. Ad-Dhuha: 8)

Dalam ayat diatas menjelaskan makna yang bahwasanya Allah SWT menjadikan seseorang miskin, namun mempunyai tanggungan keluarga yang banyak dan harus dinafkahi kemudian Allah menjadikannya seseorang tersebut kaya melalui rezeki yang telah diberikan-Nya (Kementerian Agama Replubik Indonesia, 2016).

Orang-orang yang berada didalam garis kemiskinan merupakan golongan masyarakat yang ada ditingkat paling rendah, eksistensi golongan miskin tersebut merupakan permasalahan yang paling cacat. Pada golongan masyarakat miskin, semua pemikiran yang berlebihan banyak digemari dan semua tindakan hina pun dibenarkan demi mencukupi kebutuhannya. Peristiwa semacam itu pernah terjadi pada zaman Jahiliyah, yang dimana pada saat itu orang-orang memiliki perasaan takut akan terhina oleh kemiskinan dan akibatnya

mereka rela melakukan tindak keji pembunuhan terhadap anak-anak mereka sendiri (darah daging mereka sendiri) seperti mana mereka memandang bahwasanya kemiskinan memiliki pengaruh untuk menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat (Cahya, 2015). Adapun beberapa aspek yang dapat menjadikan kemiskinan sebagai ancaman, yaitu (Qardawi, 1995):

a. Kemiskinan Mengancam Akidah

Kemiskinan bisa menjadi ancaman bagi akidah terutama pada kaum miskin yang berada dilingkup orang kaya yang akan terjadi penindasan status. Pada kondisi seperti ini, kemiskinan bisa menyebarkan bakal keraguan terhadap kebijaksanaan Allah perihal rezeki. Penyimpangan akidah dapat timbul karena akibat adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Sebagaimana firman Allah yang telah ditafsirkan oleh Syaikh Abdur Rahman As-Sa'id di dalam surat Al-'Ankabut:62 yakni :

الحمد لله، الذي خلق العلوي والسفلي، وقام بتدبيرهم ورزقهم، وبسط الرزق على من يشاء، وضيقه على من يشاء، حكمت منه، ولعلمه بما يصلح عباده وما ينبغي لهم

Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam atas dan bawah serta mengatur mereka dan memberi rezeki mereka, melapangkan rezeki bagi hamba yang Allah kehendaki dan menyempitkan rezeki hamba yang Allah kehendeki, hal itu

merupakan kebijaksanaan dari-Nya dan sesuai dengan ilm-Nya tentang apa yang bermanfaat dan yang layak bagi hamba-hamba-Nya” (Tafsir As-Sa’di:746)

b. Kemiskinan Mengancam Akhlak dan Moral

Kemiskinan tidak saja berimbas pada aspek akidah melainkan juga berimbas pada aspek akhlak dan moral, yang dimana ketika kaum fakir yang bertempat tinggal diwilayah orang berada (mewah) yang serakah bakal menggerakkan kaum fakir untuk berbuat tindak kejahatan dan mengenai norma. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Na’im seperti berikut:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya: Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.

c. Kemiskinan Mengancam Kestabilan Pemikiran

Kemiskinan yang bisa menjadi ancaman bagi kestabilan pikiran akan mempengaruhi daya pikir seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Misalnya ketika seseorang dalam kondisi miskin akan tetapi mereka memiliki keinginan untuk hidup bermewah-mewah maka daya pikir mereka akan berkonotasi buruk untuk mendapatkan kemewahan tersebut.

Salah satu wujud kekufuran dalam Islam yang disebabkan oleh kemiskinan adalah melakukan tindak kejahatan berupa

mencuri dan berzina. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis Nabi SAW:

لا يزن الزاني و هو مأمّن ولا يسرق السارق حين يسرق و
هو مأمّن (رواه مسلم عن أبي ذر)

Artinya: Tidak beriman seseorang saat dia melakukan perzinaan dan tidak beriman seseorang saat dia melakukan pencurian. (HR Muslim dari Abu Zar)

d. Kemiskinan Mengancam Keluarga

Melalui berbagai sisi, kemiskinan bisa menjadi ancaman bagi keluarga yakni, dari sisi pembentukan, kesinambungan, ataupun dari sisi keselaraannya. Melalui sisi pembentukan keluarga, bagi seorang jejaka yang ingin menggelar pernikahan, kemiskinan merupakan salah satu hambatan sulit untuk memenuhi bermacam permintaan mahar, nafkah dan berkecukupan dalam segi ekonomi.

Bahkan banyak kasus pernikahan yang timbul karena adanya faktor kemiskinan, yakni perselisihan dalam berumah tangga atau bahkan perceraian. Berdasarkan hukum Islam, hakim boleh menjatuhkan putusan atas perkara perceraian kepada pasangan suami istri dikarenakan suami tidak sanggup untuk menafkahi lagi. Maka dengan jelas dilihat bahwasanya pengaruh ekonomi terhadap tingkah laku manusia telah ditegaskan dalam Islam.

Dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwasanya mereka yang terjat dalam kemiskinan yang membuatnya menghadapi kesulitan untuk senantiasa tetap menjaga diri dan bersabar hingga perekonomian mereka membaik. Sebagaimana firman Allah yakni:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيِّبِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya) sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Q.S An-Nur:33)

e. Kemiskinan Mengancam Masyarakat dan Kestabilannya

Kemudian, kemiskinan juga bisa menjadi ancaman bagi masyarakat dalam hal keamanan dan kestabilan masyarakat. Ketika kemiskinan yang timbul dalam kehidupan seseorang dikarenakan minimnya pendapatan yang dihasilkan, masih dapat diterima. Namun, ketika kemiskinan yang timbul dalam kehidupan seseorang karena terdapat ketimpangan atau tidak meratanya alokasi pendapatan, tamaknya kaum masyarakat

kaya, dan pola hidup bermewah-mewah dalam kesengsaraan masyarakat miskin dapat memecah belah pertalian antar sesama masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Daud seperti berikut:

مَامِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَا بِهِ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا - مَعَ مَا يَدَّخِرُهُ فِي الْآخِرَةِ - مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الْحِمِّ

Selain aspek ancaman diatas, adapun ancaman lainnya yang mampu dipengaruhi oleh kemiskinan yakni ancaman untuk otonomi dan independensi, yang dimana ketika negara dalam kondisi miskin akan bergantung pada negara yang makmur dan ketika suatu negara tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya, masyarakat juga tidak akan bisa mensejahterakan dirinya sendiri atau dalam istilah lain negara tidak akan dapat maju.

2.1.5.3 Faktor Kemiskinan

Faktor kemiskinan bisa memicu seseorang untuk melakukan beraneka macam aksi kejahatan guna memperoleh kebutuhan hidup yang sangat mendasar yaitu makanan. Ketika seseorang merasa kelaparan tetapi tidak bisa memenuhi hasrat untuk membeli makanan, maka seseorang tersebut akan melakukan kejahatan bisa saja kejahatan yang dilakukan adalah mencuri

makanan disuatu tempat, perbuatan seperti itulah yang dihindari dan tidak dibenarkan.

Dalam tinjauan ekonomi Islam, kemiskinan muncul karena berbagai sebab struktural yakni (Wuri, 2013):

a. Kemiskinan muncul karena perbuatan keji manusia kepada alam yang tidak berupaya menage dengan baik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Mulk: 21

Artinya: atau siapakah Dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezki-Nya? Sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri? (Kementerian Agama Replubik Indonesia, 2016)

b. Kemiskinan muncul karena sikap acuh dan kebakhilan kaum kaya kepada kaum miskin seperti mana dijelaskan dalam Q.S Al-Imran: 180

Artinya: sekali-sekali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (Kementerian Agama Replubik Indonesia, 2016).

Dalam tinjauan Islam, faktor malas tidak diperbolehkan menjadi salah satu alasan dalam kemiskinan. Malah sebaliknya, Islam memberi pandangan kepada kaum miskin bahwasanya untuk bersedekah walaupun dengan nominal yang sangat sedikit sebagaimana terkandung dalam Q.S Al-Imran: 134

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (Kementerian Agama Replubik Indonesia, 2016).

2.1.5.4 Cara Pengentasan Kemiskinan

Pendapat yang disampaikan oleh Sayyidina ‘Ali ibn Abi Thalib bahwasanya beliau mendeklarasikan pertikaian kepada kemiskinan dan menghantam sampai tuntas guna mencegah dampaknya terhadap akidah, akhlak, dan sikap, serta guna tetap menjaga keharmonisan kerabat dan masyarakat, menjaga agar tetap damai dan kesatuan beserta mengangkat tinggi pertalian saudara antara sesama umat Islam. Agar tidak terjadi sedemikian rupa, Islam menganjurkan beberapa upaya pengentasan kemiskinan antara lain (Qardawi, 1995):

a. Bekerja (*al-‘Amal*)

Cara ini merupakan salah satu upaya yang unggul dari sekian banyak cara untuk mengentaskan kemiskinan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kekayaan dan juga mensejahterakan kehidupan duniawi yang dititipkan oleh Allah serta diperintahkan juga untuk mensejahterakan dengan dianjurkan untuk bekerja. Dalam Islam seorang pekerja tidak boleh dipersulit dalam mencapai haknya yaitu upah kerja atas tenaga yang dikeluarkannya dan tidak diperkenankan sama sekali kurang dari usaha yang telah dikerahkan. Dengan demikian, antara tenaga dan upah yang diberikan haruslah sesuai dan wajib diterima oleh pekerja sebagai haknya. Islam mendorong manusia untuk bekerja agar dapat memenuhi segala kebutuhan pokok yang diperlukan serta berusaha untuk keluar dari lingkup ketidakmampuan (miskin).

b. Mencukupi Hidup Kerabat yang Miskin

Upaya sangat efektif untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Akan tetapi, dalam Islam ada upaya lain untuk mengentas kemiskinan yakni dengan mencukupi kebutuhan hidup antar sesama kerabat miskin yang tidak mampu untuk bekerja lagi. Islam mengatur mereka yang berkecukupan untuk mencukupi kerabat yang sudah tidak mampu lagi

untuk bekerja karena faktor usia ataupun cacat agar dapat mengentas kemiskinan. Selain itu juga, agar dapat tetap menjalin ikatan persaudaraan dengan baik antar umat muslim. Kerabat kaya yang mampu mencukupi kebutuhan dari kerabat dekat yang miskin dengan mengulurkan bantuan berupa kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya akan diberi jaminan oleh Allah SWT yakni rezeki yang melimpah untuk kerabat yang mampu memberi bantuan.

c. Zakat

Dalam Islam tidak akan membiarkan takdir fakir miskin terabaikan dan memiliki sikap acuh tak acuh terhadapnya. Mereka (masyarakat) yang termasuk kaum fakir dan miskin tidak akan mungkin terlupakan karena Allah SWT telah menentukan hak-hak kaum fakir dan miskin dalam kemewahan kaum kaya yakni zakat. Tujuan pokok dari zakat yaitu untuk diberikan kepada kaum fakir dan miskin yang membutuhkan, karena mereka adalah orang yang istimewa dalam pembagian zakat seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Saw bahwasanya kaum mereka sajalah yang berhak memperoleh zakat.

d. *Jaminan Baitul Mal*

Selain menunaikan kewajiban utama yakni zakat, ada kewajiban lain yang ketika dilakukan akan mendapat balasan dari Allah SWT dan ketika tidak dilakukan tidak akan mendapat kekufuran yaitu wakaf. Wakaf merupakan kepentingan umum, yang dimana menjadi salah satu sumber ekonomi yang tidak diperbolehkan untuk didominasi secara personal tetapi hanya diperbolehkan untuk dipegang oleh negara agar kemaslahatan yang didapat bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang pada hakikatnya, wakaf ini merupakan sumber pendapatan bagi baitul mal untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin.

e. *Infaq secara Ikhlas dan Kebaikan Umat Islam*

Setiap umat Islam yang kodrati dan manusia yang terpuji merupakan pribadi yang berkenan mengamalkan sesuatu dari yang dihendaki sekalipun tidak diminta, gemar mengamalkan sedekah disaat bahagia ataupun sukar, dengan cara tidak sembunyi maupun diam-diam. Mereka mengamalkan tersebut bukan karena ingin dikenai atau terkenal dan bahkan haus akan kesohoran, melainkan khawatir akan azab atau ganjaran dari Allah SWT.

2.1.6 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Memajukan kemakmuran masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi terus stabil dalam kondisi yang semakin meningkat merupakan tujuan utama dari pembangunan ekonomi di suatu negara. Jika tingkat jumlah penduduk yang bekerja di suatu negara relatif tinggi, maka pencapaian tujuan pembangunan ekonomi akan tercapai. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang bekerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan perekonomian. Ketika jumlah penduduk yang tidak bekerja tinggi, maka masyarakat tidak bisa mencapai kemakmuran yang dituju. Sehingga kemakmuran yang dicapai akan semakin rendah.

Suatu masyarakat yang mengenyam pendidikan ke jenjang yang tinggi akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Jika masyarakat telah memiliki pekerjaan, maka jumlah penduduk yang bekerja akan meningkat. Hal itu dapat berpotensi untuk mengurangi kemiskinan dikarenakan jumlah penduduk yang bekerja dapat mempengaruhi kemiskinan karena adanya lapangan pekerja yang mampu menyerap banyaknya penduduk bekerja yang berdampak pada pendapatan individu. Pendapatan atau upah yang diperoleh oleh setiap individu yang memiliki pekerjaan dan telah bekerja akan membuatnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga taraf hidup seseorang akan meningkat. Ketika taraf hidup seseorang yang meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi,

tenaga kerja, dan pendidikan yang secara signifikan mampu untuk mengurangi kemiskinan akan membuat masyarakat untuk mencapai tingkat kemakmuran tinggi.

2.1.7 Kesejahteraan Sosial dalam Prespektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan menjadi salah satu tolak ukur bagi suatu masyarakat yang telah berada pada kondisi sejahtera. Ada banyak hal dalam mengukur kesejahteraan yakni dapat diukur dari kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, gaji dan kualitas hidup masyarakat. Dapat dilihat dari segi kemasyarakatan bahwasanya keluarga yang sejahtera akan mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga ke jenjang yang setinggi mungkin. Karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan membuat seseorang tersebut menjadi sejahtera ketika mendapatkan pekerjaan yang dengan gaji yang tinggi atau mencukupi (Mulia, 2022).

Menurut (Undang - Undang RI, 2011) Undang-Undang, kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Islam menjadi agama yang sangat peduli pada masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Ada beberapa aspek untuk menjabarkan hal tersebut, yakni yang pertama, bahwasanya masalah kesejahteraan sosial searah dengan misi Islam yang dimana misi dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Anbiyaa':107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Kedua, bahwasanya semua aspek ajaran Islam selalu melibatkan masalah kesejahteraan sosial. Seperti hubungan Allah yang harus diimbangi dengan hubungan antar sesama manusia (habl min Allah wa habl min an-nas).

Ketiga, bahwasanya konsep misi dari kekhalifahan di muka bumi ini berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seperti yang dilakukan sejak masa Nabi Adam As.

Keempat, bahwasanya dalam ajaran Islam untuk mewujudkan kesejahteraan sosial disediakan beberapa institusi atau lembaga yang menaungi wakaf, infaq dan sedekah, zakat, dan sebagainya. Ada juga Lembaga yang menyediakan bantuan material kepada anak yatim piatu, janda, orang tua, orang yang tidak mampu, dan lain-lain.

Menurut Al-Ghazali, kewajiban sosial masyarakat akan kegiatan ekonomi yang tidak terpenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Ada aspek yang mengharuskan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi, yakni: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya, keluarga. Dan yang ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan (Al-Ghazali, 1991).

Tiga aspek tersebut menunjukkan bahwasanya kebutuhan mereka yang tercukupi maka kesejahteraan seseorang akan terpenuhi. Kesejahteraan yang dirumuskan oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah al-mashlahah yang dimana menghindari kemudharatan. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan aspek harta, karena harta merupakan salah satu aspek utama dalam terpenuhinya kebutuhan pokok, yakni sandang, pangan, dan papan (A. A. Karim, 2008).

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang tinggi dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan. Adapun faktor-faktor yang memiliki hubungan positif dengan kemiskinan, yakni: tingkat pendapatan tinggi, angka pendidikan yang tinggi, kecilnya angka pengangguran yang ada.

Pertumbuhan ekonomi menjadi alat untuk mencapai keadilan karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru maka tingkat pengangguran akan berkurang serta pendapatan akan tenaga kerja yang bekerja akan meningkat. Indikator umum yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial sama halnya dengan indikator dalam mengukur tingkat kemiskinan. Dimana ketika indikator dalam kemiskinan dapat menurunkan angka kemiskinan yang terjadi maka kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi.

Indikator kesejahteraan dalam Islam telah disinggung dalam Al-Qur'an Surat Quraish ayat 3-4, sebagaimana ayat tersebut berbunyi:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

Artinya: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.

Berdasarkan arti surat diatas dapat dilihat bahwasanya ada 3 indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an, yakni menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut. Indikator dalam kesejahteraan yang pertama adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan sebagai pemilik Ka'bah yang menunjukkan bahwasanya jika seluruh indikator kesejahteraan yang berdasarkan pada aspek materi telah terpenuhi, hal tersebut tidak menjamin bahwa pemiik akan mengalami kebahagiaan. Ketika kebahagiaan yang tidak terpenuhi maka kesejahteraan tidak akan tercapai.

Indikator kesejahteraan yang kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi) yang telah dijelaskan dalam ayat diatas menunjukkan bahwasanya terpenuhinya kebutuhan konsumsi merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang bersifat tidak berlebih-lebihan (menimbun kekayaan) atau hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Sedangkan indikator kesehjeteraan yang ketiga adalah hilangnya rasa takut yang menjadi gambaran dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan tentram. (Sodiq, 2015)

2.2 Kajian Literatur

Dari beberapa penelitian jurnal terdahulu dapat disajikan secara sistematis dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

NO	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ridzky Giovanni	2018	Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016	<i>Panel Least Square (PLS)</i>	1. Variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan 2. Variabel Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan 3. Variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan

2	Eka Agustina, Moch. Nur Syechalad, Abubakar Hamzah	2018	Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat pengangguran dan Tingkat pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh	<i>Ordinary</i> <i>least</i> <i>Square</i> (<i>OLS</i>)	1. Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 2. Variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan 3. Variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan
---	---	------	--	--	---

3	Daftian, Anifatul, Lilis	2017	Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur	Data Sekunder (data <i>time</i> <i>series</i>)	1. Variabel investasi dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Variabel investasi dan tenaga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan
---	--------------------------------	------	--	--	--

4	Suripto dan Lalu Subayil	2020	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, pertumbuhan Ekonomi dan IPM Terhadap Kemiskinan di D.I Yogyakarta Periode 2010-2017	Data Panel	1. Variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 2. Variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan 3. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan
---	--------------------------------	------	--	------------	--

					4. Variabel IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan
--	--	--	--	--	---

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

5	Hafiz Nabawi	2020	Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Kota Malang	Regresi Linier Berganda	1. Variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan 2. Variabel tingkat Pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan 3. Variabel PDRB tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan
6	Nguyen Hoang Quy	2016	Relationship between Economic Growth, Unemployment and Poverty:	Uji Regresi Linier Berganda dan Uji <i>Vector Autoregres</i>	Firstly, public investment has a positive impact on economic growth.

			Analysis at Provincial Level in Vietnam	sion (VAR)	Secondly, poverty, and export & import have a negative impact on unemployment. Thirdly, public investment has a significant and positive impact on unemployment. Fourthly, unemployment; export & import; and public investment have a negative impact on poverty
--	--	--	---	---------------	--

7	Richard H. Adams	2004	Economic Growth, Inequality and Poverty: Estimating the Growth Elasticity of Poverty	Studi pustaka	Economic growth reduces poverty. In the other way, income makes economic growth and reduces the poverty.
8	Hasan Zubair	1995	Economic Development in Islamic Perspective: Concept, Objective, and Some Issues	Pendekatan deskriptif	In an Islamic economy, as in all mixed economies, the major problems of development include decisions concerning the respective role of the State and the market. Also, the education factors must be upgrade to be the good and better one.

9	Dr. Mohammad Omar Farooq	2015	The Challenge of Poverty and the Poverty of Islamic Economics	Pendekatan Deskriptif	Even though the discourse of Islamic economics deals with the issue of poverty, but as presented in this paper, it deals so in a peripheral, marginal and superficial way. Islamic economics does not identify poverty as its primary focus. Rather, it has emerged as a counterpart to the conventional economics, attempting to define the axioms as well as analytical- policy framework.
---	--------------------------------	------	---	--------------------------	--

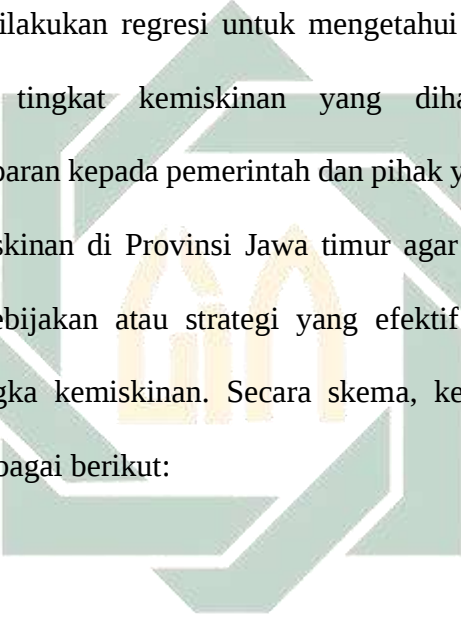
10	Mahmood Messkoub	2008	Economic Growth, Employment and Poverty in the Middle East and North Africa	Studi Pustaka	Poverty and unemployment, especially among the young, are widespread in the region. Employment has shown to be a partial answer to the question of poverty. In the general, employment-growth will reduce the poverty and make economic going grow.
----	---------------------	------	--	------------------	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kemiskinan dipengaruhi oleh tiga variabel pembangunan ekonomi, antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, dan Pendidikan merupakan bentuk dari kerangka konseptual pada penelitian ini. Pertumbuhan ekonomi menggunakan indikator PDRB untuk mengetahui pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur. Jumlah tenaga kerja yang terserap dapat mengurangi tingkat kemiskinan, dengan tenaga kerja yang meningkat maka ada bentuk aktivitas ekonomi yang berjalan dan membuat tingkat kemakmuran menjadi tinggi

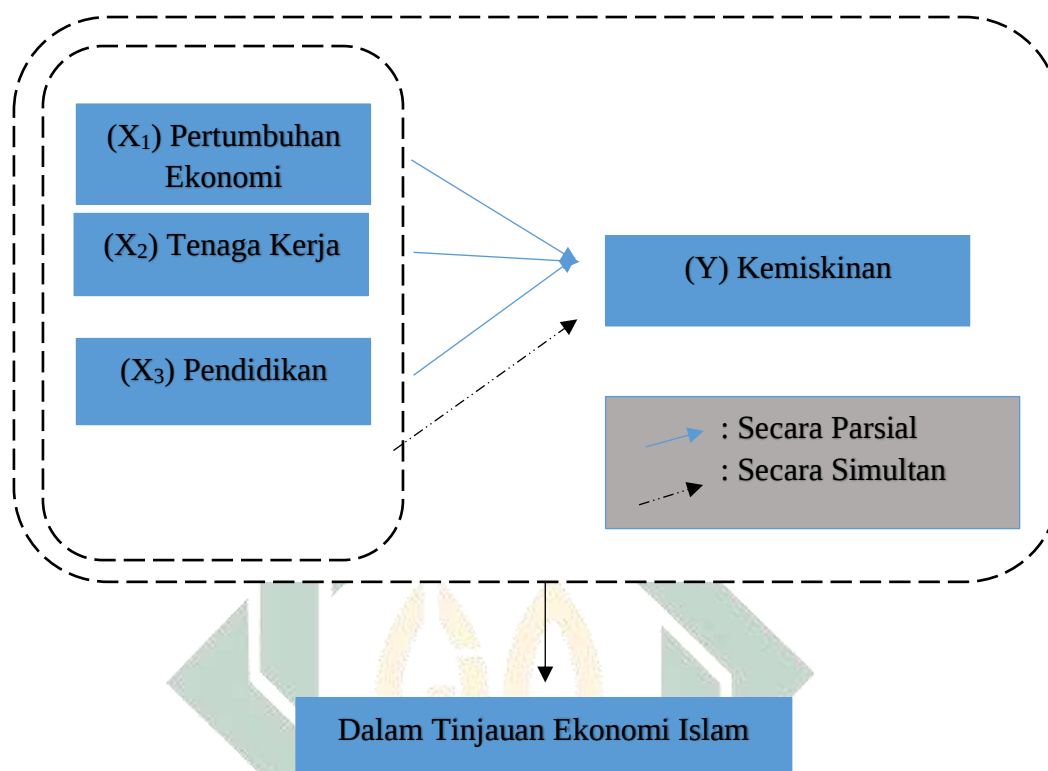
sehingga tingkat kemiskinan akan menurun. Kemudian, pendidikan untuk mengindikasikan mutu sumber daya manusia yang mengenyam sekolah ke berbagai jenjang yang tersedia, semakin tinggi jenjang sekolah yang dijalankan akan mempermudah untuk memperoleh pekerjaan.

Ketiga variabel tersebut termasuk dalam variabel *independen* (bebas) dan bersama-sama, dengan variabel *dependen* (terikat) yakni kemiskinan. Setiap variabel akan dilakukan regresi untuk mengetahui tingkat signifikan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan yang diharapkan mampu untuk memberikan paparan kepada pemerintah dan pihak yang berwenang mengenai penyebab kemiskinan di Provinsi Jawa timur agar pihak yang terakit dapat merumuskan kebijakan atau strategi yang efektif dan efisien guna untuk mengurangi angka kemiskinan. Secara skema, kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat kita lihat bahwasanya dalam penelitian ini terdapat tiga variabel X yakni Pertumbuhan Ekonomi sebagai X_1 , Tenaga Kerja sebagai X_2 , dan Pendidikan X_3 , terhadap Kemiskinan sebagai variabel Y, kemudian diuji secara parsial dan simultan untuk mengetahui tingkatan pengaruh variabel X terhadap variabel Y yang akan disajikan dalam tinjauan Ekonomi Islam.

2.4 Pengembangan hipotesis

Hipotesis merupakan suatu perkiraan jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan yang akan diuji kebenarannya. Kerangka

konseptual yang telah dibuat sebelumnya akan mempermudah untuk membuat hipotesis secara parsial maupun simultan sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta_1 = 0$, Tidak adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan
 $H_1 : \beta_1 \neq 0$, Adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan
2. $H_0 : \beta_2 = 0$, Tidak adanya pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan
 $H_1 : \beta_2 \neq 0$, Adanya pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan
3. $H_0 : \beta_3 = 0$, Tidak adanya pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan
 $H_1 : \beta_3 \neq 0$, Adanya pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan
4. $H_0 : \beta_4 = 0$, Tidak adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan pendidikan terhadap kemiskinan
 $H_1 : \beta_4 \neq 0$, Adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan pendidikan terhadap kemiskinan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode mixed methods yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut (Creswell, 2010) penelitian campuran adalah pendekatan pada penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2010) menjelaskan bahwasanya penelitian campuran merupakan sebuah metode yang menggabungkan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif yang digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan data yang lebih menyeluruh, valid, reliable dan objektif.

Dalam penelitian ini lebih menekankan pada metode kuantitatif yang dimana hasil dari data kuantitatif yang telah diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, data kualitatif yang digunakan bertujuan untuk menjelaskan data kuantitatif.

Dalam penelitian ini, metode kuantitatif yang digunakan adalah metode regresi data panel. Metode regresi data panel (*pool data*) sendiri merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section* atau bisa disebut dengan teknik regresi data panel. Untuk data *time series* meliputi seluruh variabel yang berkaitan dengan periode tahun yang digunakan, sedangkan untuk data *cross section* meliputi data variabel dependen dan variabel independent. Selain itu, dalam metode kualitatif yang digunakan adalah metode studi pustaka, yang mana penelitian ini diarahkan untuk mengumpulkan sejumlah data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Pada tahap pertama penelitian ini yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua mengenai bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan pendidikan secara silmutan dan Parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada tahap kedua, mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif untuk menjawab rumusan masalah ketiga yakni bagaimana tinjauan dari sudut pandang ekonomi Islam terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, pendidikan, dan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan pisau analisis yang berbeda setiap variabel nya. Variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan pisau analisis Abdul Hasan Muhammad Sadeq, variabel tenaga kerja menggunakan pisau analisis Imam Syaibani, variabel pendidikan menggunakan pisau analisis Al-Ghozali, dan variabel kemiskinan menggunakan pisau analisis Madzhab Hanafi.

Dengan menggunakan dua pendekatan ini akan lebih berkaitan dari mengumpulkan data hingga menganalisisnya. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang memiliki tujuan untuk membuat gambaran atau uraian perihal fakta, karakteristik serta pengaruh antara fenomena yang diteliti (Moh. Nasir, 1999).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Provinsi Jawa Timur.

3.3 Data Model Empiris

Analisis regresi data panel dipakai pada penelitian ini sebagai metode penelitian dengan melakukan estimasi PLS, FEM, REM. Model dinyatakan dibawah ini sebagai berikut:

$$Kemiskinan_{i,t} = \beta_0 + \beta_1(PDRB)_{i,t} + \beta_2(Pendidikan)_{i,t} + \beta_3(Pekerja)_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Dimana:

β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien dari variabel independen
$Kemiskinan_{i,t}$	: Tingkat kemiskinan (Persen)
$PDRB_{i,t}$	: PDRB atas harga dasar konstan (Persen)
$Pendidikan_{i,t}$	: Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
$Pekerja_{i,t}$	: Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa)
$\varepsilon_{i,t}$	: Tingkat Kesalahan (<i>error term</i>)

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional merupakan variabel penelitian yang ditujukan agar mampu mengartikan makna dari setiap variabel penelitian sebelum dihitung, dianalisis, dan mengetahui sumber asal pengukuran variabel yang digunakan. Adapun variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Pengambilan asumsi taraf pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini adalah data PDRB atas harga konstan. Menurut (Badan Pusat

Statistik, 2021), PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambahan barang dan jasa dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan satuan pengukuran persen (%).

2. Tenaga Kerja (X2)

Tenaga kerja adalah penduduk dengan usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak tidak bekerja, yang tidak mempunyai pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan dikategorikan sebagai bekerja (Badan Pusat Statistik, 2021). Indikator yang digunakan untuk memperhitungkan tenaga kerja di suatu wilayah dengan menggunakan jumlah penduduk yang sedang bekerja dengan satuan perhitungan menggunakan persen (%).

3. Pendidikan (X3)

Data pendidikan yang digunakan dalam memperhitungkan pendidikan di suatu wilayah adalah rata-rata lama sekolah. (Badan Pusat Statistik, 2021) Rata-rata lama sekolah dijadikan indikator pendidikan pada penduduk yang berusia diatas 15 tahun yang usai dalam pendidikan formal yang dimana tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang Pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Satuan perhitungan yang digunakan adalah persen (%).

4. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan individu untuk memenuhi keperluan hidupnya dalam sebuah wilayah. Untuk mengukur

kemiskinan, (Badan Pusat Statistik, 2021) menggunakan konsep kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Data yang dipakai dalam kemiskinan ini merupakan data jumlah penduduk dengan garis kemiskinan. Pada penelitian ini satuan yang digunakan untuk mengindikasikan tingkat kemiskinan pada Provinsi Jawa Timur adalah persen (%).

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk data numerik antar variabel-variabel untuk mengetahui perbandingan satu dengan dengan lain. Data kuantitatif yang diperoleh untuk setiap variabel-variabel yang digunakan yaitu berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Data kuantitatif ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, data yang digunakan adalah data kualitatif yang dikeluarkan oleh suatu instansi. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kutipan literatur buku-buku, jurnal atau website yang menggunakan metode studi pustaka.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Teknik memperoleh data atau informasi terkait variabel atau hal-hal yang berbentuk catatan, transkrip, beberapa buku, jurnal, majalah, surat

kar yang memuat data yang tersimpan di website. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data-data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Cara memperoleh data dari website resmi BPS sebagai berikut: Pertama, membuka website resmi dari BPS <https://www.bps.go.id>, Kedua, mencari data yang dibutuhkan, Ketiga, mengkategorikan data yang diperoleh menurut tahun yang digunakan dalam penelitian.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui kajian literatur terdahulu seperti buku, jurnal, laporan akhir yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

1. Metode Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *pool data* (data panel) yang merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section* atau bisa disebut dengan teknik regresi data panel. Penerapan teknik data panel mempunyai keunggulan dibandingkan dengan data lainnya seperti *time series* atau *cross section*. Keunggulan dari menghitung menggunakan data panel yakni : (1) Mengontrol heterogenitas data individual dalam satu periode waktu; (2) Menampilkan lebih banyak data (*informative*), lebih bervariasi, mempunyai tingkatan kolinearitas yang kecil antar variabel, mempunyai *degree of freedom* (tingkat kebebasan) yang lebih efisien; (3) Lebih baik dalam studi terkait *dynamics of adjustment*; (4) Kemampuan

dalam mengukur dan mengidentifikasi pengaruh yang tidak bisa dideteksi oleh data *cross-section* dan *time-series* saja; (5) Mengurangi bias akibat agregasi data ke level makro. Ada tiga pendekatan dalam menggunakan metode regresi data panel, antara lain:

a. *Pooled Least Square* (PLS)

Dengan menggunakan ini diindikasikan bahwasanya data gabungan yang tersedia menggambarkan kondisi sebenarnya. Metode regresi ini tanpa memperhitungkan sifat *cross section* dan *time series* yang terdapat pada data. PLS ini dianggap sebagai metode paling sederhana dibanding kedua metode lainnya. Model regresi ini ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it}$$

Keterangan:

i : menunjukkan *cross section*

t : menunjukkan periode waktunya

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Dengan menggunakan metode ini dapat mengetahui adanya perbedaan *intercept* antar *cross section* dengan menambahkan variabel dummy, oleh sebab itu pendekatan ini disebut dengan *Least Square Variabel* (LSDV). Model regresi ini ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_2 + \dots + \alpha_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it}$$

c. *Random Effect Model* (REM)

Pendekatan ini disebut dengan efek acak yang bisa memperbaiki efisiensi proses *Least Square* dengan memperhitungkan *error component* dan dapat menghilangkan *heteroskedastisitas*. Model regresi ini ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} + \mu_{it}$$

2. Pemilihan Model Regresi

Pengujian Statistik dilakukan melalui beberapa tahap sebagai penentuan model regresi data panel manakah yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Uji Chow

Uji Chow merupakan uji dipakai untuk menentukan model terbaik antara *Pooled Least Square* (PLS) dan *Fixed Effect Model* (FEM) untuk estimasi data. Dalam pengujian statistik ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : *Pooled Least Square Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

H_0 ditolak jika *p-value* (Prob > F) lebih kecil dari nilai signifikan (α), artinya model terbaik sementara yang digunakan adalah FEM. Tetapi jika H_0 diterima jika *p-value* (Prob > F) lebih besar dari nilai signifikan (α) model PLS yang menjadi model terbaik sementara dalam penelitian.

b. Uji Lagrange Multiplier (*Breusch Pagan Lagrangian Multiplier Test*)

Uji Lagrange Multiplier merupakan uji yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Pooled Least Square* (PLS) dan *Random Effect Model* (REM). Dalam pengujian statistik ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : *Pooled Least Square Model*

H_1 : *Random Effect Model*

H_0 ditolak jika *p-value* ($\text{Prob} > \text{Chi}^2$) lebih kecil dari nilai signifikan (α) artinya model terbaik sementara yang digunakan adalah REM. Sebaliknya, jika H_0 diterima jika *p-value* ($\text{Prob} > \text{Chi}^2$) lebih besar dari nilai signifikan (α) model PLS yang menjadi model terbaik sementara dalam penelitian.

c. Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara *andom Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Dalam pengujian statistik ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

H_0 ditolak jika *p-value* ($\text{Prob} > \text{Chi}^2$) lebih kecil dari nilai signifikan (α) artinya model terbaik yang digunakan adalah FEM. Sebaliknya, jika H_0 diterima jika *p-value* ($\text{Prob} > \text{Chi}^2$) lebih besar dari nilai signifikan (α) model REM yang menjadi model terbaik sementara dalam penelitian.

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Uji Signifikan Statistik

1. Uji t-statistik (Parsial)

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen individual dapat mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis untuk uji t adalah

$H_0 : \beta_1 = 0$ (variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh pada variabel dependen)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ (variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh pada variabel dependen)

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari α (1%, 5% atau 10%) maka secara Parsial variabel dependen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.

2. Uji F-statistik (Simultan)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis untuk uji F adalah

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$ (variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen)

$H_1 : \text{Paling tidak ada satu parameter } \beta \neq 0$ (variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen)

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari α (1%, 5% atau 10%) maka variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh secara terhadap variabel dependen.

3.8.2 Koefisiensi Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variabel dependen bisa dijelaskan dengan variabel-variabel independen yang dimana nilai R^2 yang mempunyai antara 0 sampai dengan 1. Semakin nilai R^2 mendekati 1, maka akan semakin baik. Berarti variabel independen mampu memberikan informasi untuk mengindikasikan variasi variabel dependen pada model secara keseluruhan dengan baik.

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka menggunakan analisis regresi untuk mengetahui perbedaan dua variabel tersebut. Agar memperoleh model regresi yang tepat, maka asumsi-asumsi berikut harus terpenuhi. Adapun asumsi klasik sebagai berikut:

1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti pada variabel independen. Koefisien regresi belum dapat ditetapkan dan tidak dapat mengindikasikan *standard error* karena terdapat kolinearitas

diantara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas diperlukan indikator, yakni dengan melihat koefisien korelasi (R^2) dari setiap variabel independen melalui uji-t. Nilai koefisien korelasi (R^2) yang lebih besar dari 10 berarti dalam model tersebut terjadi multikolinearitas.

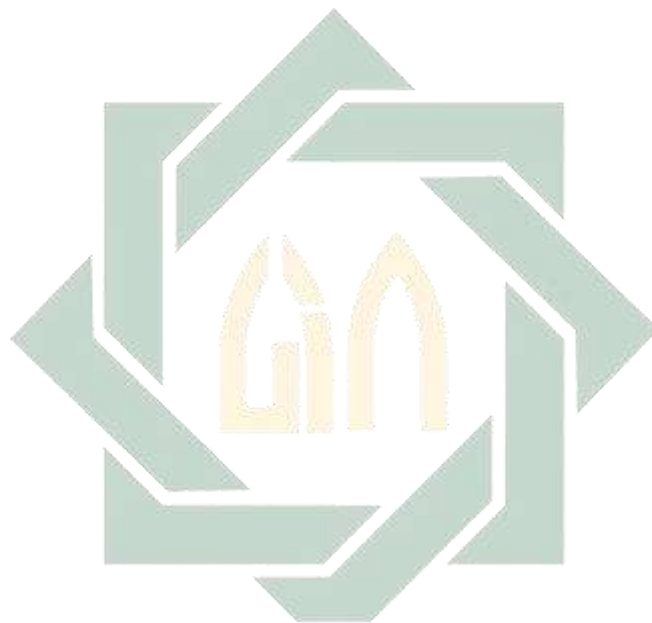
2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan kondisi dimana semua gangguan yang muncul apabila nilai residual model tidak memiliki varians yang sama. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan permasalahan yang sering terjadi pada data *cross section* yang menjadikan hasil uji-t dan uji F menjadi bias dan kemungkinan kecil bisa terjadi pada data panel. Adapun cara untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni dengan memodifikasi variabel OLS (*Ordinary Least Square*) menjadi GLS (*Generalized Least Square*) dengan memberikan bobot untuk semua variabel menggunakan nilai *Sum Square of Residual* (SSR).

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu dengan variabel sebelumnya. Autokorelasi muncul karena adanya data *time-series* (runtutan waktu). Deteksi ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin-Watson. Uji tersebut dilakukan

dengan cara membandingkan DW hitung dengan nilai atas bawah (dL) dan batas atas (dU) pada tabel Durbin Watson berdasarkan jumlah observasi dan variabel independen.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar individu didalam suatu wilayah. Kemiskinan ditinjau dari sisi ketidakmampuan ekonomi yang diukur melalui pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan atau non makanan. Penduduk yang tergolong dalam kemiskinan dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesehjateraan. Tabel 4.1 menunjukkan angka kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2017-2021. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Ketika terjadi pandemic Covid-19 pada tahun 2019 hingga 2021 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan.

**Tabel 4.1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
2017-2021 (%)**

NO	KOTA/KABUPATEN	TAHUN					NO	KOTA/KABUPATEN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021
1	KABUPATEN PACITAN	15,42	14,19	13,67	14,54	15,11	21	KABUPATEN MAGETAN	10,5	10,3	9,61	10,35	10,7
2	KABUPATEN PONOROGO	11,39	10,36	9,64	9,95	10,26	22	KABUPATEN NGAWI	14,9	14,8	14,4	15,44	15,6
3	KABUPATEN TRENGGALEK	12,96	12,02	10,98	11,62	12,14	23	KABUPATEN BOJONEGORO	14,3	13,2	12,4	12,87	13,3
4	KABUPATEN TULUNGAGUNG	8,04	7,27	6,74	7,33	7,51	24	KABUPATEN TUBAN	16,9	15,3	14,6	15,91	16,3
5	KABUPATEN BLITAR	9,8	9,72	8,94	9,33	9,65	25	KABUPATEN LAMONGAN	14,4	13,8	13,2	13,85	13,9
6	KABUPATEN KEDIRI	12,25	11,31	10,42	11,4	11,64	26	KABUPATEN GRESIK	12,8	11,9	11,4	12,4	12,4
7	KABUPATEN MALANG	11,04	10,37	9,47	10,15	10,5	27	KABUPATEN BANGKALAN	21,3	19,6	18,9	20,56	21,6
8	KABUPATEN LUMAJANG	10,87	9,98	9,49	9,83	10,05	28	KABUPATEN SAMPANG	23,6	21,2	20,7	22,78	23,8
9	KABUPATEN JEMBER	11	9,98	9,25	10,09	10,41	29	KABUPATEN PAMEKASAN	16	14,5	14	14,6	15,3
10	KABUPATEN BANYUWANGI	8,64	7,8	7,52	8,06	8,07	30	KABUPATEN SUMENEP	19,6	20,2	19,5	20,18	20,5
11	KABUPATEN BONDOWOSO	14,54	14,39	13,33	14,17	14,73	31	KOTA KEDIRI	8,49	7,68	7,16	7,69	7,75
12	KABUPATEN SITUBONDO	13,05	11,82	11,2	12,22	12,63	32	KOTA BLITAR	8,03	7,44	7,13	7,78	7,89
13	KABUPATEN PROBOLINGGO	20,52	18,71	17,76	18,61	18,91	33	KOTA MALANG	4,17	4,1	4,07	4,44	4,62
14	KABUPATEN PASURUAN	10,34	9,45	8,68	9,26	9,7	34	KOTA PROBOLINGGO	7,84	7,2	6,91	7,43	7,44
15	KABUPATEN SIDOARJO	6,23	5,69	5,32	5,59	5,93	35	KOTA PASURUAN	7,53	6,77	6,46	6,66	6,88
17	KABUPATEN MOJOKERTO	10,19	10,08	9,75	10,57	10,62	36	KOTA MOJOKERTO	5,73	5,5	5,15	6,24	6,39
18	KABUPATEN JOMBANG	10,48	9,56	9,22	9,94	10	37	KOTA MADIUN	4,94	4,49	4,35	4,98	5,09
19	KABUPATEN NGANJUK	11,98	12,11	11,24	11,62	11,85	38	KOTA SURABAYA	5,39	4,88	4,51	5,02	5,23
20	KABUPATEN MADIUN	12,28	11,42	10,54	11,46	11,91	39	KOTA BATU	4,31	3,89	3,81	3,89	4,09

Sumber: Data diolah 2023

Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan ekonomi menurun dikarenakan adanya kebijakan pembatasan aktivitas di setiap daerah untuk mengurangi sebaran virus yang menyebabkan banyaknya perusahaan atau usaha yang menutup kegiatannya atau bahkan ada yang mengalami kebangkrutan. Hal tersebut mempengaruhi penurunan jumlah penduduk yang bekerja maupun terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam jumlah besar di setiap sektornya. Akibat dari pandemi Covid-19 tersebut berdampak pada tingkat produktivitas kerja dan ekonomi sehingga mempengaruhi pendapatan dan konsumsi masyarakat di Jawa Timur.

4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Indikator pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi diukur dari tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tabel 4.2 menjelaskan gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2017 hingga 2018 mengalami perubahan yang fluktuatif. Hingga ketika pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga mencapai nilai minus dikarenakan masa pandemi Covid-19 dan bisa meningkat menjadi nilai yang optimal pada tahun 2021.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2017-2021 (%)

NO	KOTA/KABUPATEN	TAHUN					NO	KOTA/KABUPATEN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021
1	KABUPATEN PACITAN	4,78	5,28	4,87	-6,8	1,81	21	KABUPATEN MAGETAN	4,98	5,16	4,24	-6,94	2,39
2	KABUPATEN PONOROGO	4,97	5,17	4,55	-8,5	2,27	22	KABUPATEN NGAWI	5,02	5,18	4,16	-5,31	2,06
3	KABUPATEN TRENGGALEK	4,74	4,75	4,82	-6,7	2,97	23	KABUPATEN BOJONEGORO	9,93	4,14	6,09	-4,24	-6,1
4	KABUPATEN TULUNGAGUNG	4,6	4,75	4,89	-7,4	2,7	24	KABUPATEN TUBAN	4,51	4,73	4,7	-7,69	2,43
5	KABUPATEN BLITAR	4,7	4,77	4,79	-7,1	2,24	25	KABUPATEN LAMONGAN	5,47	5,41	4,47	-12,9	2,24
6	KABUPATEN KEDIRI	4,42	4,62	4,62	-5,9	2,32	26	KABUPATEN GRESIK	4,65	4,67	4,2	-3,84	2,83
7	KABUPATEN MALANG	4,78	4,93	4,84	-4,2	2,42	27	KABUPATEN BANGKALAN	2,66	3,36	0,16	-11,8	-3,43
8	KABUPATEN LUMAJANG	4,73	4,7	4,34	-9,3	2,21	28	KABUPATEN SAMPANG	3,55	2,99	0,65	0,97	-0,62
9	KABUPATEN JEMBER	4,63	4,57	5,03	-6,1	3,28	29	KABUPATEN PAMEKASAN	3,97	4,43	3,79	1,11	2,87
10	KABUPATEN BANYUWANGI	5,11	5,52	5,25	-8,7	3,27	30	KABUPATEN SUMENEP	2,44	3,25	-0,23	-4,09	1,98
11	KABUPATEN BONDOWOSO	4,51	4,62	4,79	-1,3	3,1	31	KOTA KEDIRI	4,39	4,84	4,69	-5,85	1,97
12	KABUPATEN SITUBONDO	4,53	4,95	4,93	-2,6	2,81	32	KOTA BLITAR	5,12	5,09	5,1	-6,76	3,17
13	KABUPATEN PROBOLINGGO	3,81	3,85	3,93	-0,6	2,97	33	KOTA MALANG	5,08	5,14	5,12	0,93	4,15
14	KABUPATEN PASURUAN	4,95	4,99	5,06	-0,6	3,86	34	KOTA PROBOLINGGO	4,96	4,99	4,96	-4,35	3,18
15	KABUPATEN SIDOARJO	4,2	4,43	4,27	4,33	3,63	35	KOTA PASURUAN	4,67	4,8	4,78	-7,55	2,66
17	KABUPATEN MOJOKERTO	4,82	5	4,87	-1	3,36	36	KOTA MOJOKERTO	4,93	4,97	4,69	-5,67	2,8
18	KABUPATEN JOMBANG	4,88	4,83	4,66	-5,8	2,45	37	KOTA MADIUN	5,64	5,6	5,44	-12,1	3,52
19	KABUPATEN NGANJUK	4,92	5,07	5,08	-6	2,92	38	KOTA SURABAYA	5,68	5,79	5,66	-4,05	4,03
20	KABUPATEN MADIUN	5,12	4,87	5,19	-9,6	2,3	39	KOTA BATU	5,69	5,57	5,5	-8,56	3,02

Sumber: Data diolah 2023

Pandemi Covid-19 ini diduga menjadi penyebab utama turunnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 berpengaruh pada kegiatan ekonomi dikarenakan adanya kebijakan pembatasan aktivitas disetiap daerah untuk penekanan sebaran virus diduga menjadi penyebab banyak bisnis yang menutup usahanya bahkan mengalami kebangkrutan. Hal tersebut menjadi pengaruh adanya penurunan jumlah tenaga kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam jumlah besar disetiap sektor. Akibat dari hal tersebut berdampak pada tingkat produktivitas kerja dan ekonomi sehingga mempengaruhi pendapatan dan konsumsi masyarakat di Jawa Timur.

4.1.3 Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Pekerja merupakan penduduk yang sedang bekerja berada di bawah perintah untuk memperoleh gaji atau upah atau dalam bentuk lain. Tabel 4.3 menunjukkan jumlah penduduk yang sedang bekerja di kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami

mengalami perubahan yang fluktuatif. Ada beberapa kabupaten/kota yang pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami peningkatan. Hingga pada tahun 2021 beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2017-2021 (%)

NO	KOTA/KABUPATEN	TAHUN					NO	KOTA/KABUPATEN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021
1	KABUPATEN PACITAN	99	99	98,6	99,1	97,72	21	KABUPATEN MAGETAN	94	96	96,1	96,9	96,26
2	KABUPATEN PONOROGO	96	96	96,1	96,4	95,55	22	KABUPATEN NGAWI	96	94	96,2	96,3	94,56
3	KABUPATEN TRENGGALEK	97	95	95,8	96,6	95,89	23	KABUPATEN BOJONEGORO	95	96	95,8	96,3	95,08
4	KABUPATEN TULUNGAGUNG	96	98	97,4	96,6	95,39	24	KABUPATEN TUBAN	97	97	97,2	97,2	95,19
5	KABUPATEN BLITAR	97	97	96,6	96,9	96,18	25	KABUPATEN LAMONGAN	96	96	96,8	96	94,87
6	KABUPATEN KEDIRI	95	97	95,8	96,3	94,76	26	KABUPATEN GRESIK	94	95	94,2	94,5	91,79
7	KABUPATEN MALANG	95	95	96,8	96,2	94,51	27	KABUPATEN BANGKALAN	95	95	94,8	94,2	91,23
8	KABUPATEN LUMAJANG	97	97	97,5	97,2	96,64	28	KABUPATEN SAMPANG	97	97	97,6	97,2	96,65
9	KABUPATEN JEMBER	95	95	95,9	96,2	94,88	29	KABUPATEN PAMEKASAN	96	96	97,1	97,7	96,51
10	KABUPATEN BANYUWANGI	97	97	96,3	95,9	94,66	30	KABUPATEN SUMENEP	98	98	98,2	97,8	97,16
11	KABUPATEN BONDOWOSO	98	98	96,1	97	95,87	31	KOTA KEDIRI	91	95	96,4	95,8	93,79
12	KABUPATEN SITUBONDO	96	98	98,1	97,2	96,15	32	KOTA BLITAR	96	96	95,9	95,4	93,32
13	KABUPATEN PROBOLINGGO	97	97	95,9	96,1	95,14	33	KOTA MALANG	93	93	93,2	94	90,39
14	KABUPATEN PASURUAN	93	95	93,9	94,6	93,76	34	KOTA PROBOLINGGO	96	96	96,4	95,6	93,3
15	KABUPATEN SIDOARJO	94	95	95,3	95,3	89,03	35	KOTA PASURUAN	94	95	95,5	94,9	93,67
17	KABUPATEN MOJOKERTO	96	95	95,7	96,3	94,25	36	KOTA MOJOKERTO	95	96	97,6	97,4	93,26
18	KABUPATEN JOMBANG	94	95	95,4	95,6	92,52	37	KOTA MADIUN	95	96	96,2	96	91,68
19	KABUPATEN NGANJUK	98	98	97,4	96,8	95,2	38	KOTA SURABAYA	93	94	93,9	94,1	90,21
20	KABUPATEN MADIUN	93	97	96,2	96,4	95,2	39	KOTA BATU	96	98	96,9	97,5	94,07

Sumber: Data diolah 2023

4.1.4 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Indikator dalam mengukur tingkat pendidikan dengan menggunakan rata-rata lama tahun siswa yang mengenyam pendidikan formal. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah yang ditempuh. Indikator tersebut merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas pendidikan disuatu daerah. Pada permasalahan kemiskinan, rata-rata lama sekolah merupakan aspek penting dalam mengurangi kemiskinan, karena rata-rata lama sekolah

menjadi salah satu penentu angkatan kerja yang akan memasuki dunia kerjanya.

Tabel 4.4 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2017-2021 (%)

NO	KOTA/KABUPATEN	TAHUN					NO	KOTA/KABUPATEN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021
1	KABUPATEN PACITAN	7,02	7,19	7,28	7,6	7,61	21	KABUPATEN MAGETAN	7,94	7,95	7,96	8,24	8,36
2	KABUPATEN PONOROGO	7,01	7,17	7,21	7,54	7,55	22	KABUPATEN NGAWI	6,66	6,88	6,98	7,06	7,26
3	KABUPATEN TRENGGALEK	7,2	7,27	7,28	7,55	7,56	23	KABUPATEN BOJONEGORO	6,71	6,77	7,09	7,33	7,38
4	KABUPATEN TULUNGAGUNG	7,82	8,06	8,07	8,33	8,34	24	KABUPATEN TUBAN	6,48	6,52	6,81	6,95	7,18
5	KABUPATEN BLITAR	7,26	7,27	7,29	7,39	7,5	25	KABUPATEN LAMONGAN	7,54	7,83	7,89	7,92	8,04
6	KABUPATEN KEDIRI	7,65	7,68	8,01	8,02	8,08	26	KABUPATEN GRESIK	8,95	8,96	9,29	9,3	9,56
7	KABUPATEN MALANG	7,17	7,18	7,27	7,42	7,43	27	KABUPATEN BANGKALAN	5,14	5,33	5,66	5,95	5,96
8	KABUPATEN LUMAJANG	6,2	6,21	6,22	6,4	6,67	28	KABUPATEN SAMPANG	4,12	4,36	4,55	4,85	4,86
9	KABUPATEN JEMBER	6,06	6,07	6,18	6,48	6,49	29	KABUPATEN PAMEKASAN	6,25	6,35	6,4	6,69	6,7
10	KABUPATEN BANYUWANGI	7,11	7,12	7,13	7,16	7,42	30	KABUPATEN SUMENEP	5,22	5,23	5,46	5,71	5,92
11	KABUPATEN BONDOWOSO	5,55	5,62	5,71	5,93	5,94	31	KOTA KEDIRI	9,9	9,91	9,92	9,93	10,15
12	KABUPATEN SITUBONDO	6,03	6,11	6,12	6,46	6,62	32	KOTA BLITAR	9,89	9,9	10,1	10,11	10,35
13	KABUPATEN PROBOLINGGO	5,68	5,71	5,77	6,11	6,12	33	KOTA MALANG	10,15	10,16	10,17	10,18	10,41
14	KABUPATEN PASURUAN	6,82	6,83	7,11	7,4	7,41	34	KOTA PROBOLINGGO	8,48	8,49	8,69	8,7	8,95
15	KABUPATEN SIDOARJO	10,23	10,24	10,25	10,5	10,72	35	KOTA PASURUAN	9,09	9,1	9,11	9,12	9,33
17	KABUPATEN MOJOKERTO	8,15	8,18	8,49	8,51	8,64	36	KOTA MOJOKERTO	9,98	9,99	10,24	10,25	10,47
18	KABUPATEN JOMBANG	8,06	8,21	8,53	8,54	8,55	37	KOTA MADIUN	11,10	11,11	11,13	11,14	11,37
19	KABUPATEN NGANJUK	7,38	7,61	7,63	7,64	7,78	38	KOTA SURABAYA	10,45	10,46	10,47	10,49	10,5
20	KABUPATEN MADIUN	7,3	7,54	7,8	7,81	7,82	39	KOTA BATU	8,46	8,77	9,06	9,07	9,31

Sumber: Data diolah 2023

Tabel 4.4 diatas menunjukkan angka rata-rata lama sekolah di kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2017-2021. Rata-rata lama sekolah di Jawa Timur mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sampang sebesar 4,12 pada tahun 2017, angka tersebut tergolong sangat rendah dibanding dengan kabupaten/kota yang lain karena hanya mengenyam pendidikan sampai lulus kelas 4 (empat) pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Hampir sama dengan Kabupaten Sumenep yang rata-rata lama sekolah sebesar 5,22 atau setara dengan lulus kelas 5 (lima) tingkat Sekolah Dasar (SD).

Rata-rata lama sekolah di Kota Pasuruan, Kediri dan Mojokerto sudah termasuk dalam rata-rata standar wajib sekolah di Indonesia yaitu 9. Hal tersebut dapat dikatakan baik karena mampu menyelesaikan pendidikan

sampai lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau mengenyam pendidikan dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun.

4.2 Deskripsi Statistik Variabel

Tabel 4.5 menunjukkan hasil deskriptif statistik variabel-variabel yang diaplikasikan pada penelitian ini, antara lain terdapat nilai rata-rata (mean), nilai tengah (medium), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.

Tabel 4.5 Deskripsi Statistik Variabel

Variabel	Mean	Min.	Max.	SD.
Kemiskinan (%)	11,02	3,81	23,76	4,53
PDRB(ADHK 2010) (%)	2,2	-12,86	9,93	4,4
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,81	4,12	11,37	1,59
Jumlah Pekerja (Jiwa)	547.358,51	64.400	1.499.094	332133,98

Sumber: Data diolah 2023

Hasil dari deskripsi statistik pada penelitian ini menunjukkan kemiskinan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki rata-rata sebesar 11,02%. Dengan nilai maksimum sebesar 23,76% dan minimum sebesar 3,81%, serta standar deviasi sebesar 4,53. Hal tersebut dapat menunjukkan masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Pada variabel PDRB memiliki rata rata sebesar 2,2%, dengan nilai tertinggi 9,93%, nilai terendah -12,86% dan standar deviasi sebesar 9,93. yang mana hal ini berarti pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur stabil. Adapun titik minimum terjadi pada 2020 disaat pandemi covid-19. Variabel Jumlah Pekerja menunjukkan rata-rata 547.358 jiwa, dengan nilai maksimum 1.499.094 dan minimum 64.400, serta standar deviasi 332.133. Hal ini

menunjukkan bahwa jumlah penduduk bekerja masih relatif tinggi meskipun sebelum pandemi maupun setelah pandemi. Variabel terakhir adalah Rata-Rata Lama Sekolah, yang mana memiliki rata-rata sebesar 7,81 tahun dengan nilai maksimum 4,12 tahun, nilai minimum 11,37 tahun, dan standar deviasi sebesar 1,59. Hal tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. rata-rata yang di dapat masih lebih rendah dari rata-rata standar wajib sekolah di Indonesia yakni 9 tahun.

4.3 Hasil Estimasi dan Pembuktian Hipotesis

Tabel 4.6 menunjukkan hasil regresi data panel menggunakan model *Pooled least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (REM). Tiga jenis pada regresi data panel harus dijalankan untuk mengetahui model terbaik yang akan diaplikasikan dalam model panel pada penelitian ini, antara lain melakukan uji Chow, uji LM dan uji Hausman.

Tabel 4.6 Hasil Regresi Data Panel

Variabel	Parameter	Model Estimasi		
		PLS	FEM	REM
Konstanta	β_0	56,887 (0,000)	38,384 (0,000)	49,292 (0,000)
PDRB	β_1	-0,10024 (0,019)	-0,0254 (0,024)	-0,044 (0,000)
Pendidikan	β_2	-2,454 (0,000)	-0,759 (0,003)	-1,6005 (0,000)

Variabel	Parameter	Model Estimasi		
		PLS	FEM	REM
ln Pekerja	β_3	-0,276 (0,033)	-0,223 (0,000)	-0,268 (0,000)
R-Squared		0,686	0,1624	0,1388
Prob. (F-stat)		0,0000	0,0000	0,0000

Sumber: Data diolah 2023

4.3.2. Pemilihan Model Terbaik

Setelah melakukan regresi menggunakan ketiga model regresi panel, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memilih regresi terbaik menggunakan tiga jenis uji, yaitu uji Chow yang dilakukan untuk menunjukkan model terbaik antara model *Pooled Least Square* (PLS) dengan *Fixed Effect Model* (FEM), uji LM dilakukan untuk menunjukkan model terbaik antara *Pooled Least Square* (PLS) dengan *Random Effect Model* (REM). Yang terakhir dilakukan uji Hausman yang menunjukkan model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM) yang akan menjadi model terbaik dalam penelitian.

1. Uji Chow

Uji Chow dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari model terbaik antara *Pooled Least Square* (PLS) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil uji Chow dapat dilihat dari nilai Prob > F yang terletak dibagian bawah hasil regresi dengan menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM).

Hipotesis Uji Chow:

H_0 = Memilih *Pooled Least Square* (PLS)

H_1 = Memilih *Fixed Effect Model* (FEM)

Hasil uji Chow dari nilai Prob > F sebesar 0,0000, dapat diartikan bahwa probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai α (0,05), sehingga hipotesis uji Chow adalah H_0 ditolak atau H_1 diterima. Dari hasil hipotesis tersebut dapat dipaparkan bahwasanya model yang terpilih pada uji pertama adalah *Fixed Effect Model* (FEM) pada penelitian ini.

2. Uji LM (*Lagrangian Multiplier*)

Uji LM (*Lagrangian Multiplier*) dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Pooled Least Square* (PLS) dengan *Random Effect Model* (REM). Hasil uji LM dapat dilihat dari nilai Prob > F yang terletak pada hasil regresi *Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier Test*.

Hipotesis Uji LM:

H_0 = Memilih *Pooled Least Square* (PLS)

H_1 = *Random Effect Model* (REM)

Tabel 4.7 Hasil Uji LM

Uji LM (<i>Lagrangian Multiplier</i>)	Probabilitas
<i>Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test</i>	0,000***

Sumber: Data diolah 2023

Hasil uji LM dari nilai Prob > F sebesar 0,0000, dapat diartikan bahwa probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai α (0,05), sehingga hipotesis diperoleh dari uji LM adalah H_0 ditolak atau H_1 diterima. Dari hasil hipotesis tersebut dapat diartikan bahwa model terpilih dari Uji LM adalah *Random Effect Model* (REM) dalam penelitian ini.

3. Uji Hausman

Uji Hausman dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM). Hasil Uji Hausman dilihat dari nilai Prob > F Uji Hausman yang telah diregresi sebelumnya.

Hipotesis Uji Hausman:

$H_0 = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$

$H_1 = \text{Random Effect Model (REM)}$

Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman

Hausman test	Probabilitas
	0,0000

Sumber: Data diolah 2023

Hasil Uji Hausman dari nilai Prob > F sebesar 0,0000, dapat diartikan bahwa probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai α (0,05), sehingga hipotesis Uji Hausman yang diperoleh adalah H_0 ditolak atau H_1 diterima. Dari hasil hipotesis tersebut dapat dikatakan bahwa

model terbaik yang terpilih pada Uji Hausman adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dalam penelitian ini. Uji Hausman ini merupakan uji penentu terakhir dari ketiga model yang ada.

4.3.3. Identifikasi Model Estimasi Terbaik Regresi Data Panel

Setelah melakukan pengujian model terbaik, hasil regresi menunjukkan model yang terpilih yang akan diaplikasikan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dan menunjukkan pengaruh nilai pada setiap variabel independent yaitu PDRB, rata-rata lama sekolah dan jumlah pekerja terhadap variabel dependen yaitu penduduk miskin.

Tabel 4. 9 Model Terpilih FEM

Kemiskinan	Coef.	Std. Err.	T	P> T	[95% Conf. Interval]	
Pdrb	-0,0254	0,0111	-2,28	0,024	-0,047	-0,003
Pendidikan	-0,759	0,252	-3,01	0,003	-1,257	-0,261
Lnpekerja	-0,0223	0,0424	-5,26	0,000	-0,307	-0,139
Constanta	38,384	5,17	7,42	0,000	28,167	48,601
R-Squared	0,1624					
Prob > F	0,0000					

Sumber: Data diolah 2023

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it}$$

$$\text{Kemiskinan}_{it} = 38,384 - 0,0254X_{1it} - 0,0223X_{2it} - 0,759X_{3it} + \mu_{it}$$

Dimana:

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien dari variabel independen

X_{1it} : PDRB

X_{2it} : Tenaga Kerja

X_{3it} : Pendidikan

μ_{it} : Tingkat Kesalahan (*error terms*)

koefisien-koefisien persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut:

4.3.4. Uji Asumsi Klasik

Setelah model terpilih dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil uji multikolinearitas atau uji *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat diuji dengan cara melihat nilai VIF.

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

UIN
S U

. vif, uncentered

Variable	VIF	1/VIF
employment	23.15	0.043194
education	23.11	0.043281
gdp	1.25	0.798772
Mean VIF	15.84	

Sumber: Data diolah 2023

Pada penelitian ini terdapat permasalahan multikolinearitas pada semua variabel karena nilai VIF yang menunjukkan rata-rata 15,84 yang artinya nilai VIF lebih besar dari 10 ($VIF > 10$).

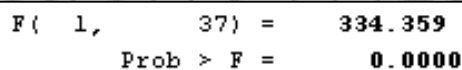
Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas yang menunjukkan jika nilai probabilitas *chi-square* (0,0000) lebih besar dari α (0,05) artinya terdapat masalah heteroskedastisitas dalam variabel.



chi2 (38)	=	9913.40
Prob>chi2	=	0.0000

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan Uji Wooldridge, model terbebas dari masalah autokorelasi jika nilai probabilitasnya ($\text{Prob} > F$) lebih besar dari 0,05 (α). Hasil estimasi menunjukkan jika ($\text{Prob} > F = 0,0000$) $> 0,05$ yang dapat diartikan bahwa model dalam penelitian ini terindikasi masalah autokorelasi.



F(1, 37)	=	334.359
Prob > F	=	0.0000

Gambar 4.2 Hasil Uji Autokorelasi

4.3.5. Perbaikan Model Estimasi

Hasil estimasi model yang telah dilakukan terindikasi permasalahan multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Masalah tersebut diatasi dengan metode Generalized Least Square (GLS) adalah salah satu dari beberapa metode estimasi parameter yang dapat dilakukan untuk

memperbaiki permasalahan autokorelasi apabila nilai koefisien autokorelasi (ρ) diketahui dan juga dapat digunakan untuk memastikan hasil estimasi tidak melanggar asumsi klasik dan bisa diaplikasikan sebagai hasil estimasi model yang tepat, tidak bias, dan konsisten.

Tabel 4.11 Hasil Regresi GLS

Variabel	GLS
PDRB	-0,10024
Pendidikan	-2,45424
InPekerja	-0,2765

Sumber: Data diolah 2023

Hasil estimasi menggunakan metode GLS menunjukkan bahwa variabel independen pendidikan dan jumlah pekerja berpengaruh signifikan sedangkan variabel independent PDRB berpengaruh tetapi tidak signifikan. Interpretasi masing-masing koefisien dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien dari variabel PDRB yakni sebesar -0,10024 dan tidak signifikan. Hasil ini dapat diartikan bahwa ketika nilai PDRB naik sebesar 1 satuan maka kemiskinan menurun sebesar 0,1% dengan ketentuan variabel lainnya konstan.
2. Nilai koefisien dari variabel rata-rata lama sekolah yakni sebesar -2,45424 dan signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika nilai pendidikan naik sebesar 1 satuan maka kemiskinan turun sebesar 2,5% dengan ketentuan variabel lainnya konstan.

3. Nilai koefisien dari variabel jumlah pekerja yakni sebesar -0,2765 dan signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika jumlah pekerja naik sebesar 1 satuan maka kemiskinan turun sebesar 0,28% dengan ketentuan variabel lainnya konstan.

4.3.6. Uji t-Statistik (Parsial)

Uji t atau uji parsial digunakan untuk melakukan pengujian pada tiap-tiap variabel independent apakah memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen yang dapat dilihat dari nilai t-stat terhadap nilai signifikansi ($\alpha=0,05$).

Tabel 4.12 Hasil Uji t-Statistik (Parsial)

kemiskinan	Coef.	Std. Err.	t	P> t
PDRB	-0,0254	0,0111	-2,28	0,024
Pendidikan	-0,759	0,252	-3,01	0,003
LnPekerja	-0,0223	0,0424	-5,26	0,000
Constanta	38,384	5,17	7,42	0,000

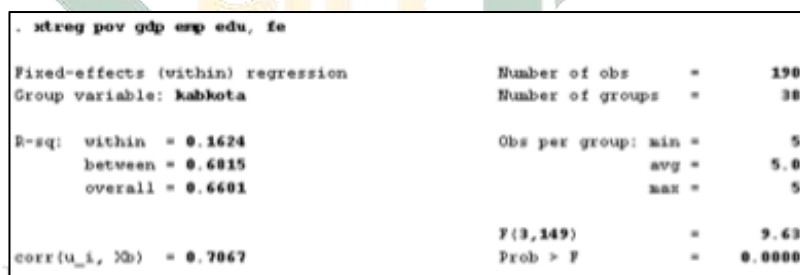
Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki nilai t-stat sebesar 0,024 yang berarti lebih kecil dari nilai α (0,05), nilai ini menunjukkan variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Variabel pendidikan memiliki nilai t-stat sebesar 0,003 yang berarti lebih kecil dari nilai α (0,05), nilai ini menunjukkan variabel pendidikan berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel jumlah pekerja memiliki nilai t-stat sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai α (0,05). Hasil tersebut menunjukkan variabel jumlah pekerja secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

4.3.7. Uji F-Statistik (Simultan)

Uji F atau uji simultan dilakukan untuk melihat secara keseluruhan atau secara bersama-sama bagaimana variabel PDRB, pendidikan, dan jumlah pekerja memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan dengan melihat probabilitas F-statistik (Prob>F) terhadap tingkat signifikansi α (0,05).



. xtreg pov gdp emp edu, fe			
Fixed-effects (within) regression			
Group variable: kabkota	Number of obs	=	190
	Number of groups	=	38
R-sq: within = 0.1624	Obs per group: min	=	5
between = 0.6815	avg	=	5.0
overall = 0.6681	max	=	5
corr(u_i, Xb) = 0.7867	F(3,149)	=	9.63
	Prob > F	=	0.0000

Gambar 4. 3 Hasil Uji F-Statistik (Simultan)

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan hasil regresi, nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,0000 lebih kecil dari α (0,05) yang berarti bahwa secara simultan variabel PDRB, pendidikan, dan jumlah pekerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

4.3.8. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independent dapat menjelaskan variabel dependen. Jika nilai determinasi semakin besar, maka variabel-variabel independen memberikan hampir keseluruhan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai determinasi (R Square) yang lebih kecil berarti kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen adalah terbatas. Dalam penelitian ini, nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai sebesar 0,1624 yang artinya variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 16% sedangkan 84% dijelaskan oleh factor lain yang ada diluar model.

4.3.9. Pembuktian Hipotesis

Setelah melakukan uji regresi, terpilihlah model *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model terbaik yang terpilih dan diaplikasikan untuk mengestimasi variabel pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan pendidikan yang memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

Model empiris regresi data panel yang terpilih adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Tabel 4.13 Hasil Regresi Data Panel

kemiskinan	Coef.	Std. Err.	t	P> t
PDRB	-0,0254	0,0111	-2,28	0,024
Pendidikan	-0,759	0,252	-3,01	0,003
LnPekerja	-0,0223	0,0424	-5,26	0,000
Constanta	38,384	5,17	7,42	0,000

Sumber: Data diolah 2023

$$Y_{it} = 38,384 - 0,0254X1_{it} - 0,0223X2_{it} - 0,759X3_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

β_0 : Konstanta

X_1 : PDRB

X_2 : Tenaga Kerja

X_3 : Pendidikan

Koefisien-koefisien persamaan regresi data panel diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta pada persamaan regresi sebesar 38,384 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya bernilai nol, maka variabel kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 38%.
2. Nilai koefisien dari variabel PDRB yakni sebesar -0,0254 yang menunjukkan bahwa jika variabel PDRB meningkat 1 satuan, maka kemiskinan turun sebesar 0,03% dengan ketentuan variabel lainnya konstan.

3. Nilai koefisien dari variabel tenaga kerja yakni sebesar $-0,0223$ yang menunjukkan bahwa jika variabel tenaga kerja meningkat 1 satuan, maka kemiskinan turun sebesar $0,02\%$ dengan ketentuan variabel lainnya konstan.
4. Nilai koefisien dari variabel rata-rata lama sekolah yakni sebesar $-0,759$ yang menunjukkan bahwa jika variabel rata-rata lama sekolah meningkat 1 satuan, maka kemiskinan turun sebesar $0,6\%$ dengan ketentuan variabel lainnya konstan.

4.4 Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan indikator PDRB yang menunjukkan tingkat kemakmuran disuatu daerah. PDRB merupakan suatu nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit perekonomian.

Pada hasil penelitian parsial ini diperoleh bahwa PDRB berpengaruh signifikan pada nilai nyata $0,05$ dengan nilai t -stat $0,024$ dan berhubungan negatif dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar $(-0,0254)$, yang berarti bahwa apabila PDRB naik sebesar 1 persen, maka kemiskinan akan menurun sebesar $0,0254$ persen. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori penelitian ini. Menurut Kuznet (Tambunan, 2003) bahwasanya pertumbuhan ekonomi dan

kemiskinan memiliki hubungan yang sangat kuat sebab pada tingkat pertama proses prosedur pembangunan aspek kemiskinan cenderung meningkat dan pada waktu mencapai prosedur akhir pembangunan jumlah oprang miskin perlahan-lahan semakin berkurang. Bahwasanya efektifnya pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui berbagai macam sektor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Giovanni, 2018) dalam penelitian terdahulu bahwasanya PDRB berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY karena nilai probabilitasnya lebih kecil α dari 0,05. Yang dimana nilai PDRB tersebut mampu untuk mengurangi kemiskinan di provinsi tersebut karena semakin meningkatnya nilai PDRB setiap tahunnya dan menyebar baik disetiap golongan termasuk penduduk miskin dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY.

Dilihat dari tahun ke tahun kondisi perekonomian masyarakat, semua masyarakat mengerti bahwasanya ketika harga barang dan jasa yang semakin mahal sedangkan pendapatan masyarakat yang cenderung tidak bertambah bahkan ada yang berkurang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak baik maka kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur juga belum terwujud. Kesejahteraan dalam pertumbuhan ekonomi tidak dilihat dari pendapatan per kapita dan pendapatan nasional, tetapi juga bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan secara merata yang menjadi lingkup

keadilan. Islam menjalankan distribusi pendapatan ini dengan adil dan merata dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwasanya nilai keadilan sangat dijunjung tinggi untuk mencapai tingkat kesejahteraan bagi umat-Nya. Jika keadilan telah diterapkan dalam sistem ekonomi dan dijunjung tinggi maka akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara merata. Upaya yang dapat menyamaratakan sistem ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan adalah dengan dilakukannya pengalokasian dana bantuan secara merata untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhaqi bahwasanya sistem pendistribusian harta harus dialokasikan secara merata, tidak hanya tersebar di kalangan orang kaya tetapi juga bagian dari hak-hak orang miskin terutama orang-orang yang membutuhkan.

4.4.2. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Seperti teori yang dikemukakan oleh Lewis bahwasanya pekerja dalam satu sektor akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain. Terserapnya tenaga kerja yang berlebihan akan meningkatkan nilai upah di pedesaan.

Pada hasil penelitian parsial ini diperoleh bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan pada nilai nyata 0,05 dengan nilai t-stat 0,000 dan berhubungan negatif dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar (-0,0233), yang berarti bahwa apabila tenaga kerja naik sebesar 1 persen, maka kemiskinan akan menurun sebesar 0,0233 persen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Prasetyawan et al., 2017) tercantum dalam penelitian terdahulu bahwasanya tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan sebesar 0,012. Koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tenaga kerja maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun.

Semakin tingginya jumlah angkatan kerja yang diimbangi dengan tingginya daya serap tenaga kerja yang baru akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuat daya beli masyarakat semakin tinggi, sehingga permintaan barang dan jasa akan semakin tinggi pula yang akan membuat produsen memproduksi dalam jumlah banyak. Dengan demikian kegiatan perekonomian akan berjalan dengan baik dan angka kemiskinan akan menurun.

Pemanfaatan tenaga kerja dalam Islam menerapkan fungsi kekhalifahan dan fungsi sebagai pembangun yang dianjurkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, manusia wajib mempertimbangkan setiap kemungkinan yang menjadi syarat pertimbangan dalam melaksanakan setiap kegiatannya. Didalam kehidupan manusia, desakan yang paling utama adalah memfokuskan dan menyalurkan segala kemampuan fisik maupun non fisik agar dapat mencukupi taraf kehidupan yang lebih baik.

Menurut Imam Syaibani, kerja merupakan usaha untuk memperoleh uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja didasari dengan konsep istikhaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk mensejahterakan dunia dan bertanggung jawab untuk menginvestasikan serta meluaskan kekayaan yang dititipkan oleh Allah SWT untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Ketenagakerjaan sering dikaitkan dengan permasalahan dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti permasalahan lapangan pekerjaan, pengangguran, rendahnya SDM, permasalahan kenaikan gaji. Oleh karena itu, tenaga kerja yang didasari oleh nilai etos kerja yang tinggi dapat mampu menangani permasalahan tersebut.

Dalam lingkup dunia kerja, jika sesuatu tidak dikerjakan dengan kemampuan yang benar dan pengetahuan yang mencukupi akan menjadikan pekerjaan yang dilakukan menjadi tidak berkualitas. Menurut Islam, pekerjaan yang baik yakni pekerjaan yang tidak bercampur dengan sesuatu

yang diharamkan dan diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap orang yang bertindak dalam urusan dunia maupun akhirat.

Etos kerja didasari dengan semangat kerja yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Semakin baik etos kerja maka semakin baik pula kualitas hasil kerja yang diperoleh. Manusia dengan segala kehidupan yang cukup terbilang luas dan kompleks. Dalam upaya mencapai pemenuhan kebutuhan pokok, maka Islam menyuruh kepada setiap kepala keluarga untuk bekerja. Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rezeki, dan berikhtiar. Sebagaimana dalam Q.S Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu kembali setelah dibangkitkan.

4.4.3. Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Peranan penting dalam pendidikan adalah meningkatkan mutu hidup manusia dalam perkembangan intelektual maupun keterampilan. Dari hasil penelitian parsial ini diperoleh bahwa pendidikan berpengaruh signifikan pada nilai nyata 0,05 dengan nilai t-stat 0,003 dan berhubungan negatif dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar (-0,7596), yang berarti apabila bahwa pendidikan naik sebesar 1 persen, maka kemiskinan akan menurun sebesar 0,7596 persen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Subayil, 2020) dalam penelitian terdahulu bahwasanya pendidikan secara berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. Variabel pendidikan mempunyai koefisien negative, yang artinya sesuai dengan hipotesis bahwasanya pendidikan yang semakin meningkat akan menyebabkan menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.

Pendidikan merupakan salah satu variabel yang penting dalam menunjang tumbuhnya tenaga kerja yang lebih baik. Ketika pendidikan yang ditempuh tidak mencapai dalam target wajib belajar yang telah diterapkan oleh pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun, maka masyarakat tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mampu mencukupi kebutuhan hidup yang lebih baik. Dimana ketika seseorang miskin yang menginginkan pekerjaan yang layak untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi maka harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga pendidikan yang ditempuh tidak hanya sampai di tingkat pendidikan 9 tahun saja. Tetapi dari hasil regresi yang didapat bahwasanya pendidikan ini tidak begitu memengaruhi menurunnya tingkat kemiskinan. Sebagai contohnya seseorang yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali atau bahkan tidak cukup sesuai dengan standart wajib sekolah 9 tahun tetapi ia mempunyai keterampilan melukis yang layak mampu menghasilkan lukisan dengan nilai ekonomi yang tinggi.

Dalam hasil penelitian ini ada beberapa kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang tidak sesuai dengan implementasi dari *maqasid syariah* yakni *hifdzul aql* (memelihara akal) yang dimana mampu mengikuti proses kependidikan dari jenjang yang masih rendah (Sekolah Dasar) hingga ke jenjang yang lebih tinggi (Perguruan Tinggi) untuk dapat meningkatkan potensi akal sebagai manusia yang beradab. karena memang pada dasarnya, manusia diberi akal pikiran agar dapat digunakan dengan sebaik mungkin dalam menimba ilmu pengetahuan. Masyarakat diwajibkan mengikuti standar program wajib belajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau bahkan bisa melebihi dari standar tersebut agar terhindar dari kebodohan. Program wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah selaras dengan konsep *hifdzul aql* dalam *maqasid syariah* yang ditinjau dari pendidikan di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur yang berorientasi untuk mendorong setiap manusia agar memaksimalkan potensi akal sebagaimana fungsinya, menjadi pedoman untuk menemukan bakat setiap manusia, dan mendorong manusia untuk tidak mengikuti hawa nafsu nya seperti kemalasan yang mengakibatkan akal pikiran tidak berjalan sebagaimana fungsinya.

Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali yakni ber-*taqarrub* kepada Allah SWT dan manusia selalu tawakal kepada Allah merupakan manusia yang sempurna dihadapannya. Kesempurnaan yang digapai oleh manusia dengan cara berusaha untuk mendapatkan ilmu dan menerapkan fadhilah dengan bekal ilmu yang telah dipelajari. Allah Subhanahu Wa Ta'aala akan meninggikan orang-orang yang berilmu dengan derajat yang sesuai berupa

ilmu dan iman di surga. Sehingga Allah akan membalas semua orang yang beramal dengan amalan, semua orang yang baik dibalas dengan kebajikannya dan semua orang yang buruk dibalas dengan keburukan. Maka dapat ditarik kesimpulan, dalam Islam pendidikan sangat penting untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang diperoleh akan meningkatkan kualitas diri sebagai manusia sesuai dengan prinsip *hifdzul 'aql*. Dengan begitu akan menjadikan seseorang dapat menilai antara yang baik dan buruk serta dapat menyongsong kehidupan yang lebih baik.

4.4.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Pendidikan secara simultan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Dari hasil penelitian model regresi data panel dengan Uji F diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwasanya secara simultan atau secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan meningkatkan pula kapasitas konsumsi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi penentu penting dari peningkatan konsumsi akhir rumah tangga karena dapat mengurangi kemiskinan. ketika seseorang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya terpenuhi, maka seseorang tersebut harus memiliki pendapatan yang baik. pendapatan akan diperoleh ketika seseorang memiliki pekerjaan. Semakin

tinggi jumlah angkatan kerja yang diserap sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuat daya beli masyarakat semakin tinggi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik. Untuk mencapai pendapatan diatas rata-rata setiap daerah atau wilayah dilihat dari produktivitas dan keterampilan yang dimiliki.

Produktivitas dan keterampilan tersebut dapat dicapai ketika seseorang mengenyam pendidikan yang telah diwajibkan pemerintah yakni program belajar 9 tahun. Meningkatnya produktivitas akan meningkatkan pendapatan dan mengentaskan pendudukan dari masalah kemiskinan. Semakin lama seseorang mengenyam pendidikan dalam jangka waktu yang panjang akan memungkinkan seseorang mendapatkan pekerjaan yang baik dengan upah gaji yang diperoleh juga semakin tinggi. Dengan pendapatan yang tinggi akan mempermudah seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan dapat meningkatkan daya beli seseorang meningkat. Ketika daya beli seseorang yang meningkatkan maka akan meningkatkan produsen untuk memproduksi barang dengan kuantitas yang tinggi, sehingga akan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Dengan demikian angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur akan berkurang.

Dalam Islam telah dijelaskan bahwasanya tingkat perekonomian yang baik apabila negara mampu mengelola sumber daya yang tersedia dengan benar. Hal tersebut ditegaskan dengan karya yang berjudul *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah* (Model Kota Idaman) oleh seorang ilmuwan Islam

yakni Al-Farabi. Yang dimana dalam kitab tersebut, beliau menulis bahwa negara ideal bagi kaum Muslim adalah negara yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan warganya dan pemimpin yang ideal bagi suatu negara adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan tinggi. Dengan kata lain bahwa suatu negara diharuskan memiliki pemimpin yang cerdas, yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan kebijakan atau strategi yang ada dengan melibatkan seluruh penduduk untuk mencapai kemashlahatan umat bersama.

4.4.5. Dampak Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur dalam Prespektif Ekonomi Islam

Kemiskinan yang dialami masyarakat di Provinsi Jawa Timur berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa aspek yang belum mencapai tingkat kesejahteraan yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tabel tingkatan kemiskinan yang menunjukkan bahwasanya kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Timur mengalami kenaikan yang drastis akibat adanya pandemi Covid-19. Peristiwa tersebut mengakibatkan banyaknya perusahaan atau usaha yang menutup kegiatannya bahkan ada yang mengalami kebangkrutan. Hal tersebut mempengaruhi penurunan jumlah penduduk yang bekerja akan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam jumlah besar dan mengakibatkan lebih banyak masyarakat yang menjadi pengangguran.

Ketika banyaknya masyarakat yang menjadi pengangguran, maka tingkat produktivitas kerja setiap masyarakat menjadi menurun. Hal tersebut akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi yang dilihat dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu contoh pada sektor pelayanan transportasi udara yang kehilangan banyak pendapatan karena adanya pemberhentian penerbangan bahkan jika diperbolehkan untuk melakukan perjalanan udara harus disertai dengan surat keperluan yang memadai. Kemudian dari sektor investasi, banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun perdagangan yang menurunnya tingkat permintaan akan barang karena banyaknya tempat wisata yang tutup dan dilarangnya kunjungan yang menyebabkan UMKM berhenti untuk memproduksi barang. Hal tersebut membuat pendapatan yang dimiliki oleh setiap masyarakat menjadi menurun. Pendapatan yang menurun akan menjadikan masyarakat kesulitan akan memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Ketika masyarakat tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya maka masyarakat akan kehilangan hak kesehataannya.

Selain kemiskinan bisa membuat masyarakat menjadi kehilangan hak kesehataannya, kemiskinan juga berdampak pada hilangnya pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang tinggi. Jika dilihat dari fakta yang ada, kesulitan untuk mencari pekerjaan yang layak dengan pendapatan yang tinggi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini kebanyakan dialami oleh masyarakat yang

hanya berpendidikan SD hingga SMA. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dikarenakan karena kurangnya biaya untuk mengenyam pendidikan di setiap keluarga yang kurang mampu dalam segi ekonomi.

Dalam Ekonomi Islam, kemiskinan dapat disebabkan oleh factor keterbatasan untuk berusaha. Bahkan dalam Islam pun telah dijelaskan bahwasanya Islam mendorong manusia untuk bekerja agar dapat memenuhi segala kebutuhan pokok yang diperlukan serta berusaha untuk keluar dari lingkup ketidakmampuan (miskin). Keterbasan usaha yang dialami oleh masyarakat di Provinsi Jawa Timur dikarenakan keterbatasan kondisi. Hal tersebut dikarenakan karena kondisi pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur yang terkena dari dampak pandemi Covid-19 yang membatasi gerak-gerik perekonomian di setiap daerah.

Jika seseorang ingin terlepas dari kondisi yang miskin maka mereka harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat meningkatkan kualitas hidup kearah yang lebih sejahtera dan tidak akan meninggalkan garis keturunan yang lemah, seperti tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9, yakni:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Adapun makna dari ayat diatas bahwasanya sekelompok masyarakat yang lemah adalah cerminan dari kemiskinan yang artinya jauh dari kata sejahtera dan kemiskinan itu tidak akan hilang dengan sendirinya jika tidak diimbangi dengan usaha dari seorang hamba kepada Tuhan-nya.

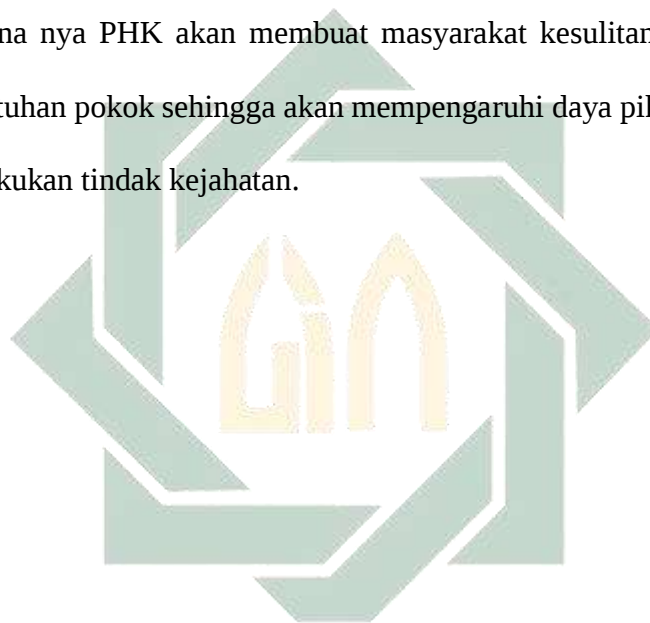
Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dengan maksud bahwasanya Islam sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. Islam menjadi agama yang sangat peduli pada masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Semua aspek ajaran Islam selalu melibatkan masalah kesejahteraan sosial seperti konsep misi dari kekhalifahan di muka bumi ini berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan sejak masa Nabi Adam As. Ketika kebutuhan masyarakat yang tercukupi maka kesejahteraan seseorang akan terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan dapat memperkirakan tingkat kesejahteraan sosial. dimana ketika indikator dalam kemiskinan dapat menurunkan angka kemiskinan yang terjadi maka kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Dalam prespektif Islam, hasil penelitian ini sejalan dengan Surat Quraisy ayat 3-4 pada poin kedua yang dimana kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur belumlah terwujud dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam kebutuhan konsumsi.

Masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dikarenakan pendapatan yang diperoleh menurun. Pendapatan yang menurun diakibatkan karena kondisi perekonomian pada tahun 2019 yang tidak stabil akibat adanya pandemi Covid-19. Kondisi tersebut mengharuskan banyaknya perusahaan atau bisnis yang mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan banyaknya karyawan yang terkena PHK sehingga membuat tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Begitu pun dengan usaha di masing-masing sektor yang permintaan akan barang dan jasa yang semakin menurun membuat usaha tersebut tidak memiliki pemasukan. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memberi upah kepada karyawan juga ikut menurun.

Kemudian kesejahteraan yang belum terwujud di Provinsi Jawa Timur direpresentasikan juga kedalam poin ketiga dari Surat Quraissy yakni terciptanya rasa aman, nyaman, dan tentram. Pada masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunkan aktivitas masyarakat membuka peluang kejahatan bagi para pencuri. Para pencuri ini mencuri bahan pokok karena tidak dapat membeli kebutuhan pokok dengan sendiri. Masyarakat menjadi waspada dengan maraknya kejahatan yang semakin tinggi. Faktor yang dapat memicu tingginya kejahatan yang semakin tinggi adalah tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur terutama pada tahun 2019. Sesuai dengan teori (Qardawi, 1995) tentang ancaman kemiskinan yang dimana kemiskinan dapat mengancam akhlak dan moral serta mengancam kestabilan pemikiran. Yang dimana ketika seseorang berada disuatu

kondisi ekonomi yang tidak stabil atau berada di garis kemiskinan akan menggerakkan seseorang tersebut untuk melakukan tindak kejahatan. seperti halnya yang terjadi tahun 2019 pada masa pandemi Covid-19 yang suatu kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Timur yang tidak stabil dan angka kemiskinan yang meningkat dikarenakan banyaknya masyarakat yang memperoleh pendapatan menurun, pemasukan yang semakin kecil dan terkena nya PHK akan membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga akan mempengaruhi daya pikir seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur secara signifikan selama periode 2017-2021 dengan nilai sebesar $0,0254 < 0,05$. Pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kapasitas konsumsi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kemiskinan yang tinggi. Dan ditinjau dalam perspektif Islam yang disesuaikan dengan teori Muhammad Sadeq yang menginterpretasikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi memiliki peran besar dalam kesejahteraan manusia yang artinya bahwasanya tingkat kemiskinan yang meningkat akan berdampak pada kesejahteraan.
2. Tenaga kerja mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur secara signifikan selama periode 2017-2021 dengan nilai sebesar $0,0223 < 0,05$. Tenaga kerja dapat mempengaruhi kemiskinan karena adanya penyediaan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap banyaknya penduduk bekerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk dan menjadi salah satu cara menurunkan angka kemiskinan yang tinggi. Dan ditinjau dalam perspektif Islam yang

3. disesuaikan dengan teori Muhammad Al Bahi bahwasanya semua kemampuan yang ada harus dimanfaatkan untuk mencari, memperoleh dan mempelajari pekerjaan, yang artinya kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan untuk mencapai kesejahteraan.
4. Pendidikan yang menggunakan indikator rata-rata lama sekolah yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur secara signifikan selama periode 2017-2021 dengan nilai sebesar $0,759 < 0,05$. Pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan karena rata-rata lama sekolah menjadi investasi modal pembangunan manusia, semakin lama seseorang mengenyam pendidikan maka memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan pendapatan yang tinggi sehingga angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur akan menurun. Dan ditinjau dalam perspektif Islam yang disesuaikan dengan teori Al-Ghazali bahwa dalam Islam, pendidikan sangat penting untuk menentukan kehidupan yang akan dijalani kedepannya layak atau tidaknya.
5. Dari hasil penelitian menggunakan model regresi data panel, dapat dinyatakan secara simultan bahwasanya adanya pengaruh signifikan dengan nilai sebesar $0,0000 < 0,05$ dari variabel independen yakni pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan pendidikan yang berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Selain itu hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 16%

sedangkan 84% dijelaskan oleh faktor lain yang ada diluar model. Dalam Islam, tingkat perekonomian yang baik apabila negara mampu mengelola sumber daya yang ada dengan benar.

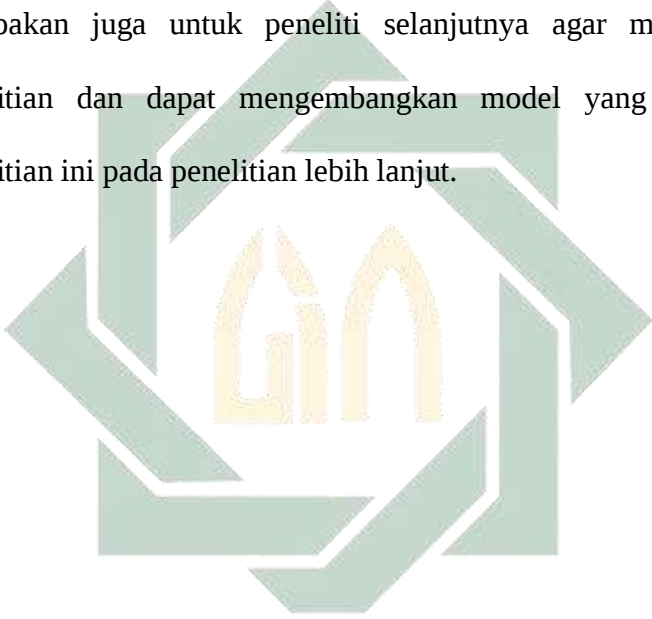
6. Kemiskinan yang meningkat selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur berdampak pada hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin (kebutuhan pokok). Berdasarkan ekonomi Islam, masyarakat di Provinsi Jawa Timur belum memperoleh kesejahteraan secara materi karena beban ekonomi yang ditanggungnya.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas, berikut saran yang diusulkan untuk pemerintah dan masyarakat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat mempersiapkan kebijakan atau strategi yang dapat meningkatkan PDRB Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi tingkat kemiskinan disetiap kabupaten/kota di Jawa Timur.
2. Perlu adanya program pendidikan oleh pemerintah di wilayah penelitian yang memiliki rata-rata lama sekolah dibawah standar wajib belajar di Indonesia yaitu 9 tahun yang telah diterapkan oleh pemerintah. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan lamanya rata-rata sekolah dapat mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka kemiskinan disetiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

3. Membuka lapangan pekerjaan di Provinsi Jawa Timur yang diharapkan mampu menyetap tenaga kerja lebih banyak dan mampu meningkatkan pendapatan seseorang serta menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur.
4. Saran untuk para peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. diharapkan juga untuk peneliti selanjutnya agar menambah periode penelitian dan dapat mengembangkan model yang digunakan pada penelitian ini pada penelitian lebih lanjut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, H. (2011). *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam* (Cet. 1). Alfabeta.
- Agus, Z. (2018). PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 3(2), 21–38. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v3i2.28>
- Al-Ghazali. (1991). *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*. 2.
- Arep, Ishak, & Tanjung. (2003). *Manajemen Motivasi*. Graindo.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPM.
- Arsyianti, L. D., & Syauqi, I. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Arunachalam, R., & Shenoy, A. (2017). Poverty traps, convergence, and the dynamics of household income. *Journal of Development Economics*, 126, 215–230. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2017.02.001>
- Atmanti, H. D. (2005). *INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN*.
- At-Tariqi, A. A. H. (2004). *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Cet. 1). Magistra Insania Press.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Definisi Kemiskinan*. bps.go.id
- Bappenas. (2019). *Teori Kemiskinan*. <https://www.bappenas.go.id>
- Boediono. (1985). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE.
- Boediono. (1999). *Pertumbuhan Ekonomi*.
- Burhanuddin. (2014). Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Prespektif Islam. *Adliya, Vol 8 No 1*.
- Cahya, B. T. (2015). KEMISKINAN DITINJAU DARI PERPEKSTIF AL-QURAN DAN HADIS. *JURNAL PENELITIAN*, 9(1). <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.850>
- Chaplin, J. (2001). *Kamus Psikoloji. Terjemahan: Kartono, K.* Pionir Jaya.
- Cholili, F. M. (2014). Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia). Diss.
Universitas Brawijaya.

Christianto, T. (2013). *Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Riau*. Vol. VII, No. 2.

Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (III). Pustaka Pelajar.

Giovanni, R. (2018). *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016*.

Halim, A. R., & Gultom, S. S. (1987). *Seri Perburuhan Aktual*. PT. Pradnya Paramita.

Hansen, Don Rand Mowen, & Maryanne M. Mowen. (1999). *Akuntansi Manajemen*.

Huda, N. (2008). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Kencana Prenada Media Group.

Huda, N. (2012). *Keuangan Publik Islam*. Kencana Prenada Media Group.

Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenadamedia Group.

Humanira, S., & Annisa. (2013). Kredit Berbasis Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Study Kasus: Gramen Bank, Bangladesh). *Jurnal The Moslem Plamer* 1.

Itang. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan. *Jurnal Keiskaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan*, Vol. 16, No. 1.

Karim, A. A. (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.

Karim, A., & Adiwarman. (2007). *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga* (Ketiga). Rajawali Pers.

Kementerian Agama Replubik Indonesia. (2016). *Syamil Al-Qur'an dan terjemah perkata*. PT Sygma Examedia Arkanleema.

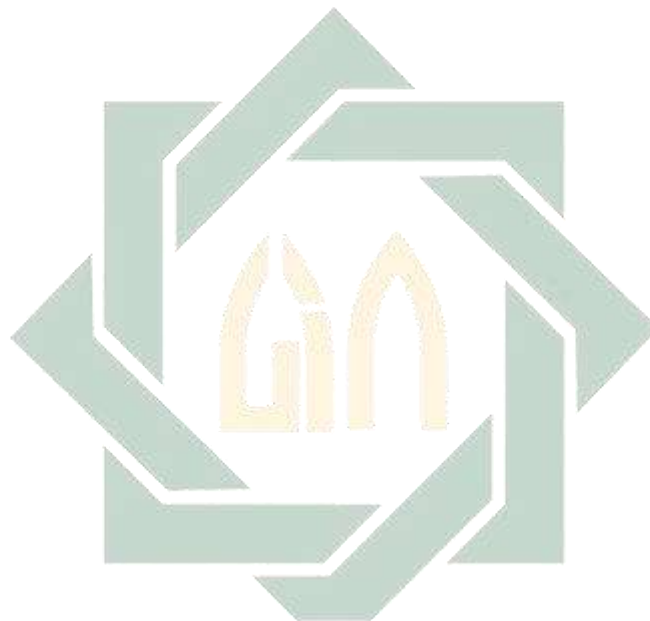
Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan* (4th ed.). UPP STIM YKPM.

Manulang, S. H., & Hamzah, A. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rineka Cipta.

- Maryam, S., Daeng, A., & Saputri, D. (2020). The Waiting Time Analysis of Educated Workers in Sumbawa Regency. *AFEBI Economic and Finance Review*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.47312/aefr.v5i01.290>
- Mei Alfianto, D. B., Istiyani, N., & Priyono, T. H. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 6(1), 85. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i1.11108>
- Messkoub, M. (2008). *Economic Growth, Employment, and Poverty in the Middle East and North Africa*.
- Moh. Nasir. (1999). *Metode Penelitian*. Ghali Indonesia.
- Mulia, R. A. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. 2(1).
- Mulyadi S. (2017). *Ekonomi Sumber Daya Manusia: Dalam Perspektif Pembangunan* (Rev. Cet. 7). Rajawali Pers.
- Mustika, C. (2011). *PENGARUH PDB DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE 1990-2008*.
- Muttaqin, R. (2018). *Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective*. 2.
- Naqvi, S. N. H. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Nugroho, D., Asmanto, P., & Adji, A. (2020). *KEMISKINAN DI INDONESIA: PENERAPAN PADA OUTLOOK JANGKA PENDEK*.
- Prasetyawan, D. T., Hanim, A., Yuliati, L., & Kalimantan, J. (2017). *Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur*.
- Qardawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Gema Insani Pers.
- Sadeq, A. H. M. (2004). *Economic Development In Islam*. Dhaka.
- Saputri, N. A. A., Ismanto, B., & Santoso, T. N. B. (2022). Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Angka Melek Huruf, Angka Putus Sekolah Dalam Disparitas Anggaran Pendidikan. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 151–162. <https://doi.org/10.33059/jseb.v13i2.3570>

- Siamtupang, P., & Dermoredjo, S. K. (2003). *Produksi Domestik Regional Bruto, Harga dan Kemiskinan di Indonesia* (No. 1). Prisma.
- Siregar, H. (2008). *DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN*.
- Sodiq, A. (2015). *KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM*. 3(2).
- Soetomo. (1995). *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Pustaka Jaya.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Alfabeta.
- Subayil, L. (2020). *PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGANGGURAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI D.I.YOGYAKARTA PRIODE 2010-2017*. 1(2).
- Sugiyono. (2010). *Metodo Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2008). *Teori Pengantar Makro*. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko. (2002).
- Susanti, S. (2003). Pengaruh Produk Domestik Regional bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, Vol. 9, No. 1.
- Tambunan, T. (2003). *Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi*.
- Tarigan, R. (2005). *Tenaga Kerja*.
- Tasmara, T. (2002). *Etos Kerja Islami*. Gema Insani Pers.
- Tholhah Hasan, M. (2004). *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia* (Cet. 3). Lantabora Pers.
- Triwuyono, I. (2000). *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah* (Cet. 1). LKis.
- Undang-Undang NO.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. (2003). BP. Cipta Jaya.
- Undang-Undang RI. (2003).
- Undang—Undang RI (11th ed.). (2011).
- Ustama, D. D. (2009). *PERANAN PENDIDIKAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN*. 6(1).

- Wahyuningtyas, R., Rusgiyono, A., & Wilandari, Y. (2013). *ANALISIS SEKTOR UNGGULAN MENGGUNAKAN DATA PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010)*. 2(3).
- Wizard. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Gramedia.
- World Bank. (2004). *Aspek Kemiskinan*.
- Wuri, R. (2013). Kemiskinan: Bagaimana Islam Memandangnya. *Jurnal The Moslem Plamer* 1.
- Yusuf, S. D. (2010). *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A